

PPAS TA. 2024

KABUPATEN BINTAN



Bintan
wonderful
indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan tahunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka disusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang disusun setiap tahunnya.

Penyusunan dokumen APBD berpedoman pada dokumen KUA dan PPAS yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal tersebut sejalan dengan pasal 265 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada RKPD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
3. Menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif, maka langkah berikutnya dilanjutkan pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 ini disusun dengan mencantumkan:

1. Sinergisitas program Pemerintah Kabupaten Bintan dengan prioritas pembangunan nasional;
2. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan prioritas pembangunan provinsi;
3. Prioritas Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2024.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2024, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Bintan ke depan.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Penentuan prioritas penting oleh karena untuk tetap fokus kepada capaian program pembangunan, pengawasan penggunaan sumber daya agar efisien, efektif dan optimal serta membangun komunikasi mengenai program/kegiatan antar stakeholder yang menghubungkan antara kebijakan dan tujuan ekonomi sosial pemerintah.

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman dan gambaran tentang kemampuan keuangan Pemerintah Daerah baik dari sisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang dijabarkan dalam rencana Pendapatan, rencana Belanja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta rencana Pembiayaan.
2. Sebagai dasar untuk sinkronisasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pembangunan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
3. Sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dituangkan kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5);
33. Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di jelaskan bahwa Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. Penerimaan Daerah merupakan rencana yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii) Pendapatan Transfer dan (iii) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan Potensi Daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Otonomi Daerah. Semakin tinggi kualitas Otonomi Daerah, maka ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Jumlah pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang direncanakan merupakan jumlah perkiraan yang terukur secara rasional yang diharapkan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan maupun penerimaan pembiayaan. Rencana penerimaan daerah tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.174.837.834.343,00.

1.4 Rencana Target Pendapatan Asli Daerah

Rencana Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 325.170.516.319,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.313.222.115.319,- maka mengalami peningkatan sebesar 3,81 persen atau sebesar Rp.11.948.401.000,-. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2024 yang diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 adalah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah mengalami penurunan dibandingkan proyeksi pada Tahun Anggaran 2023, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah tetap atau sama dengan proyeksi pada tahun anggaran 2023. Rincian untuk masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

- 1) Estimasi Penerimaan Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.271.015.989.000,- jika dibandingkan dengan penerimaan pada APBD Murni tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.12.158.840.000,- atau 4,70 persen.
- 2) Estimasi Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 10.682.412.000,- jika dibandingkan dengan rencana penerimaan pada APBD Murni

tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.210.439.000,- atau 1,93 persen.

- 3) Estimasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.10.477.231.219,- tidak mengalami perubahan atau sama dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2023.
- 4) Sedangkan Estimasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.32.994.884.100,- tidak mengalami perubahan atau sama dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2023.

1.5 Rencana Target Pendapatan Transfer

Penerimaan dari Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Penerimaan ini merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat penerimaannya saling mengisi dan melengkapi.

Pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.821.206.009.295,- apabila dibandingkan dengan Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.821.353.073.295,- maka mengalami penurunan sebesar Rp.147.064.000,- atau 0,02 persen. Kelompok Penerimaan dari Pendapatan transfer yang mengalami penurunan adalah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik akibat dari penyesuaian angka sesuai alokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Rincian untuk masing-masing sumber Dana Perimbangan, sebagai berikut:

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan; dana insentif daerah; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana desa. Rencana penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, pada APBD Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.750.220.562.000,- jika dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Murni 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.147.064.000,- atau 0,02 persen.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Rencana penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.70.985.447.295,- tidak mengalami perubahan atau sama dengan rencana penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Murni tahun 2023.

1.6 Rencana Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari : hibah, dana darurat, dan/atau, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyeksi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah tahun 2024 diproyeksikan Rp.3.171.257.500,-, tidak mengalami perubahan atau sama dengan rencana penerimaan pada APBD Murni tahun 2023.

1.7 Rencana Target Penerimaan Pembiayaan

Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
RENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	1.149.547.783.114	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	325.170.516.319	
4.1.01.	Pajak Daerah	271.015.989.000	Perda Kab. Bintan Nomor 1 Tahun 2011 dan Perda Kab. Bintan Nomor 11 Tahun 2011
4.1.02.	Retribusi Daerah	10.682.412.000	Perda Kab. Bintan Nomor 1 Tahun 2011 dan Perda Kab. Bintan Nomor 11 Tahun 2011
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.477.231.219	Hasil RUPS Deviden Bank Riau Kepri dan BPR Bintan
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	32.994.884.100	Jasa Giro, Deposito, BLUD, dan Dana Kapitasi JKN
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	821.206.009.295	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	750.220.562.000	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.985.447.295	Peraturan Gubernur Provinsi Kepri
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.171.257.500	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	0	
4.3.02.	Dana Darurat	0	
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.171.257.500	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.149.547.783.114	
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.290.051.229	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.290.051.229	
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0	
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		25.290.051.229	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		1.174.837.834.343	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Pembangunan Kabupaten Bintan pada tahun 2024 akan segera memasuki tahun ke tiga pada pelaksanaan RPJMD 2021-2026. RPJMD 2021-2026 telah dilaksanakan pada tahun 2022, dan 2023 (on going), berbagai capaian dan permasalahan mewarnai dalam pembangunan Kabupaten Bintan. Dalam perencanaan pembangunan perlu adanya pemilihan prioritas pembangunan yang akan menjadi focus arah pembangunan, sehingga akan lebih jelas sasaran-sasaran pembangunan apa saja yang harus dicapai dalam focus pembangunan tahun ini.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman yang harus diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dimaksud harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan program strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bintan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun optional sesuai perkembangan pembangunan saat ini.

Adapun, kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 dalam mencapai visi dan misi Kepala daerah melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Memedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis Program Provinsi (RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024) dan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP tahun 2024;
3. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2024; serta;
4. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun 2024. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka pagu indikatif bagi belanja langsung setiap OPD, di susun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan pagu indikatif belanja langsung OPD diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien antara lain melalui :

1. Belanja daerah Tahun 2024 diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bintan yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Tetap mempertahankan alokasi belanja wajib bidang pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah, alokasi belanja wajib bidang kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji.
4. Mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat ke Infrastruktur Daerah minimal 25% sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
 - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.

- b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan.
6. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Bintan, termasuk investasi bidang pendidikan, pariwisata, perikanan, hotel & restoran.
7. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
- a. Penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi diprioritaskan untuk mendanai perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta jaringan jalan;
 - b. Penerimaan dana bagi hasil pengalokasiannya disesuaikan dengan petunjuk teknis penggunaan sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang.
 - c. Penerimaan dana bagi hasil sumberdaya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan umum;
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik daerah dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dialokasikan untuk mendanai kebutuhan non fisik antara lain Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Labkesda, Dana Jaminan Persalinan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Bintan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan mengacu pada arah pembangunan tahun ke-3 maka tema pembangunan Kabupaten Bintan pada tahun 2024 adalah ***” Penguatan pertumbuhan ekonomi yang didukung peningkatan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”***.

Sesuai tema ini pembangunan daerah menitikberatkan pada ekonomi, infrastruktur dan lingkungan. Selain itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam rangka mendukung hal tersebut maka pembangunan difokuskan pada pengembangan produk unggulan daerah diharapkan lebih berkualitas dan inovatif. Hal ini bertujuan agar produk daerah mampu bersaing dengan produk dari luar daerah, sehingga diharapkan struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Bintan menjadi lebih kuat. Dengan Perekonomian yang kuat diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah akan meningkat, hal ini dikarenakan dengan peningkatan perekonomian masyarakat menjadi pendorong dalam struktur ekonomi Kabupaten Bintan. Pembangunan perekonomian daerah ini didukung dengan pembangunan infrastruktur yang diharapkan akan mampu mempercepat pergerakan/distribusi dan perputaran perekonomian daerah. Kemudian dalam rangka keseimbangan maka pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan lingkungan hidup. Sehingga

pembangunan yang berjalan tidak merugikan ekosistem lingkungan dan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dalam proses pembangunan ini secara keseluruhan akan didukung dengan pelayanan public yang handal dan professional. Dengan demikian pembangunan Kabupaten Bintan dapat terlaksana dengan maksimal.

Dengan mencermati dan memahami dinamika pembangunan, permasalahan, dan menelaah sasaran dan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Bintan 2021-2026 khususnya tahun 2024 beserta tema pembangunan Kabupaten Bintan maka prioritas pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel III.1.
Prioritas dan Fokus pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2024

Tema Pembangunan 2024: Penguatan pertumbuhan ekonomi yang didukung peningkatan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
Prioritas Kab. Bintan 2024		Fokus Pembangunan	
1	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	1	Meningkatkan pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan kompetensi petani, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian
		2	pembangunan perikanan dan kelautan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan serta peningkatan kualitas produk hasil perikanan
		3	Fokus pembangunan industri adalah peningkatan kualitas pengelolaan kawasan industri dan pengembangan kawasan industri
		4	Fokus pembangunan pariwisata adalah pengembangan desa wisata dan promosi wisata untuk wisatawan nusantara
		5	Pembangunan koperasi dan UMKM difokuskan pada peningkatan kapasitas koperasi sebagai sumber permodalan dalam pengembangan Usaha mikro, dan pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil
		6	Peningkatan nilai investasi difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan perijinan yang mudah diakses oleh investor

Tema Pembangunan 2024: Penguatan pertumbuhan ekonomi yang didukung peningkatan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
Prioritas Kab. Bintan 2024		Fokus Pembangunan	
		7	Peningkatan penanganan PPKS difokuskan pada penanganan anak terlantar, usia lanjut terlantar disabilitas terlantar, gelandangan dan penanganan bencana sebagaimana tertulis dalam Standar pelayanan minimal
		8	Penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, kapasitas tenaga kerja sesuai dengan pangsa pasar
		9	Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan, SNP dan SDGs
		10	Pembangunan kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan promotif dan preventif serta pencapaian SPM bidang kesehatan
		11	Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pelestarian cagar budaya dan kesenian tradisional melayu
2	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	12	Peningkatan indek konektivitas difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan angkutan
		13	Peningkatan cakupan universal akses difokuskan pada pemenuhan akses air minum baik PDAM maupun PAMSIMAS serta akses sanitasi yang difokuskan pada penanganan limbah domestik
		14	Penanganan kumuh difokuskan pada penanganan kawasan kumuh sesuai dengan SK Bupati dengan membangun rumah layak huni, penguatan KOTAKU, penanganan perumahan sesuai dengan SPM
3	Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	15	Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas udara, air tutupan lahan dan pengelolaan serta pengurangan sampah
4	Peningkatan Pelayanan Publik	16	Peningkatan kualitas perencanaan difokuskan pada kesesuaian

Tema Pembangunan 2024: Penguatan pertumbuhan ekonomi yang didukung peningkatan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan			
Prioritas Kab. Bintan 2024		Fokus Pembangunan	
			perencanaan dan penganggaran, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
		17	Peningkatan pambgunan berbasis elektronik difokuskan pda implementasi SPBE di Perangkat daerah, peningkatan kualitas satu data , kualitas penanganan arsip berbasis elektronik dan kemandirian informasi pemerintah
		18	Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik dalam mencapai kemudahan akses pelayanan

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 dilaksanakan dengan sasaran dan target sebagai berikut:

Tabel III.2.

Prioritas, Fokus Pembangunan, sasaran, dan target pembangunan Kabupaten Bintan Tahun 2024

Prioritas Kab. Bintan 2024	Fokus Pembangunan		Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
Prioritas 1. Peningkatan Perekonomian Masyarakat			Tujuan 1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,44	5
	1	Meningkatkan Pembangunan Pertanian Difokuskan Pada Peningkatan Kompetensi Petani, Peningkatan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian	1	Meningkatnya Kontribusi Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi	% Pertumbuhan Kontribusi Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Dalam PDRB	%	7,2	8,25
	2	Pembangunan Perikanan Dan						

Prioritas Kab. Bintang 2024	Fokus Pembangunan		Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
		Kelautan Difokuskan Pada Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perikanan Dan Kelautan Serta Peningkatan Kualitas Produk Hasil Perikanan						
	3	Fokus Pembangunan Industri Adalah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kawasan Industri Dan Pengembangan Kawasan Industri	2	Meningkatnya Kontribusi Industri Pengolahan Dalam Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	41,5	42,5
	4	Fokus Pembangunan Pariwisata Adalah Pengembangan Desa Wisata Dan Promosi Wisata Untuk Wisatawan Nusantara	3	Meningkatnya Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi	% Pertumbuhan Pendapatan Pariwisata	%	236,48	3
	5	Pembangunan Koperasi Dan Umkm Difokuskan Pada Peningkatan Kapasitas Koperasi Sebagai Sumber Permodalan Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Dan Pengembangan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil			% Pertumbuhan Kontribusi Perdagangan Besar Dan Eceran Dalam PDRB	%	9,36	10
	6	Peningkatan Nilai Investasi Difokuskan Pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Yang Mudah Diakses	4	Meningkatnya Investasi	% Pertumbuhan Realisasi Investasi	%	15,53	1,4

Prioritas Kab. Bintang 2024	Fokus Pembangunan		Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
		Oleh Investor					
			Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Penanganan Kesejahteraan Dan Kemandirian Masyarakat	Angka Kemiskinan	%	6,44	6,2
	7	Peningkatan Penanganan Ppks Difokuskan Pada Penanganan Anak Terlantar, Usia Lanjut Terlantar Disabilitas Terlantar, Gelandangan Dan Penanganan Bencana Sebagaimana Tertulis Dalam Standar Pelayanan Minimal	5 Meningkatkan Kualitas Penanganan Kesejahteraan	% Penduduk Miskin Ekstrem Yang Ditangani	%	50,86	54,42
	8	Penurunan Pengangguran Difokuskan Pada Peningkatan Kompetensi, Sertifikasi, Kapasitas Tenaga Kerja Sesuai Dengan Pangsa Pasar	6 Meningkatkan Penanganan Pengangguran	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	%	6,91	5,21
			Tujuan 3. Meningkatkan Masyarakat Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,99	75,85
	9	Peningkatan Kualitas Pendidikan Difokuskan Pada Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, Snp Dan Sdgs	7 Meningkatkan Masyarakat Yang Berpendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.27	13,5
				Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	8.70	8,8
	10	Pembangunan Kesehatan Masyarakat Difokuskan	8 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,76	70,78

Prioritas Kab. Bintang 2024	Fokus Pembangunan		Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
		Pada Peningkatan Promotif Dan Preventif Serta Pencapaian Spm Bidang Kesehatan						
			Tujuan 4. Meningkatkan Nilai Nilai Budaya Melayu Dalam Pembangunan		% Obyek Pemajuan Budaya Yang Dikembangkan	%	80	85
	11	Pembangunan Kebudayaan Difokuskan Pada Pelestarian Cagar Budaya Dan Kesenian Tradisional Melayu	9	Meningkatnya Pemajuan Dan Pelestarian Budaya	% Nilai Nilai Budaya Melayu Yang Di Lestarkan	%	2,04	12
Prioritas 2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur			Tujuan 5. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Disemua Wilayah Berbasis Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang		IKLI (Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur)	Nilai	71,08 (2021)	71,23
	12	Peningkatan Indek Konektivitas Difokuskan Pada Peningkatan Kualitas Jalan Dan Angkutan	10	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Indek Konektivitas	Indeks	323,53	325
	13	Peningkatan Cakupan Universal Akses Difokuskan Pada Pemenuhan Akses Air Minum Baik Pdam Maupun Pamsimas Serta Akses Sanitasi Yang Difokuskan Pada Penanganan Limbah Domestik	11	Meningkatnya Capaian Infrastruktur Dasar	% Cakupan Universal Akses	%	78,83	89,53
	14	Penanganan Kumuh Difokuskan Pada Penanganan						

Prioritas Kab. Bintang 2024	Fokus Pembangunan		Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
		Kawasan Kumuh Sesuai Dengan Sk Bupati Dengan Membangun Rumah Layak Huni, Penguatan Kotaku, Penanganan Perumahan Sesuai Dengan Spm						
Prioritas 3. Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan	15	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Difokuskan Pada Peningkatan Kualitas Udara, Air Tutpan Lahan Dan Pengelolaan Serta Pengurangan Sampah	12	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Nilai	69,67	70,17
Prioritas 4. Peningkatan Pelayanan Publik			Tujuan 6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih		IRB (Indeks Reformasi Birokrasi)	Indeks	50,01	68,09
	16	Peningkatan Kualitas Perencanaan Difokuskan Pada Kesesuaian Perencanaan Dan Penganggaran, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan	13	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai Sakip	Nilai	64,88	75
	17	Peningkatan Pambgunan Berbasis Elektronik Difokuskan Pda Implementasi Spbe Di Perangkat Daerah, Peningkatan Kualitas Satu Data , Kualitas	14	Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,1	2,58

Prioritas Kab. Bintang 2024	Fokus Pembangunan		Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target 2024
		Penanganan Arsip Berbasis Elektronik Dan Kemanan Informasi Pemerintah						
	18	Peningkatan Pelayanan Publik Difokuskan Pada Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik Dalam Mencapai Kemudahan Akses Pelayanan	15	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	Rata Rata Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,66	87,51

Dengan memahami tabel sasaran dan target diatas, terdapat target indicator sasaran ditahun 2024 yang disesuaikan dengan kondisi “khusus”, yaitu indikator persentase Pertumbuhan Pendapatan Pariwisata dan Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi. Kedua indikator ini mempunyai realisasi yang cukup tinggi ditahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tingginya angka realisasi ini diasumsikan merupakan efek pantulan dari Pandemi Covid-19. Dengan demikian untuk target tahun 2024 mengambil angka target sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bintang Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Tabel yang menggambarkan Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Bintang terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana yang ada dalam Tabel 3.1., Tabel 3.2. dan Tabel 3.3.

Tabel III.3.
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan (%)	Seluruh Kecamatan	137,145,940.00
Total					1,183,438,903,713.00

Tabel III.4.
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Optimalisasi Birokrasi Pemerintahan yang Efektif					
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	9,678,030,712.00
Total						1,183,438,903,713.00

Tabel III.5.
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ke t.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
						8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Laporan	Kab. Bintan		

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BEDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup serta setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Sebagaimana disebutkan pula pada ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sebagaimana dimaksud diatas menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait

Belanja Daerah disusun berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Daerah atau Rencana Belanja Daerah pada tahun anggaran 2024 didasarkan pada kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah sebesar Rp. 1.174.837.834.343,- yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja transfer. Untuk lebih jelasnya plafon anggaran sementara masing-masing urusan pemerintahan dan per OPD dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel IV.1.
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Kode	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	281,281,176,934.00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	139,778,562,400.00	
1.02.0.00.0.00.01.0001	Puskesmas Berakit	966,310,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Toapaya	1,610,371,991.00	
1.02.0.00.0.00.01.0003	Ppk Blud Puskesmas Teluk Sasah	1,650,395,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0004	Ppk Blud Puskesmas Kijang	2,542,876,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0005	Ppk Blud Puskesmas Tanjung Uban	3,085,677,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Sei Lekop	1,648,556,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Numbing	1,075,866,566.00	
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Kelong	1,503,320,500.00	
1.02.0.00.0.00.01.0009	Ppk Blud Puskesmas Kawal	2,280,964,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Teluk Bintan	1,347,452,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Sri Bintan	1,400,705,500.00	
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Tambelan	2,293,281,458.00	
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Kuala Sempang	1,462,722,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Mantang	1,683,985,000.00	
1.02.0.00.0.00.01.0015	Ppk Blud Teluk Sebong	2,723,057,500.00	
1.02.0.00.0.00.01.0016	Rumah Sakit Umum Daerah	36,407,165,438.00	
1.02.0.00.0.00.01.0017	Upt Balai Pengelolaan Farmasi Dan Alkes	253,981,832.00	

Kode	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	51,497,704,689.00	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	33,466,435,438.00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	17,300,968,891.00	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11,379,677,050.00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	16,309,866,001.00	
2.07.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	5,627,249,419.00	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10,482,797,115.00	
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	16,506,495,115.00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	25,324,123,071.00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7,848,931,395.00	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6,595,340,294.00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	11,888,815,892.00	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	14,981,125,028.00	
2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	12,259,356,651.00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8,337,484,416.00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	8,836,054,599.00	
2.22.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	11,792,829,351.00	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	5,408,281,801.00	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	15,098,367,840.00	
4.01.0.00.5.06.01.0000	Sekretariat Daerah	69,841,441,103.00	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	31,983,384,000.00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	16,426,686,738.00	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	156,901,082,441.00	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	21,401,579,254.00	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,307,028,138.00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	10,902,683,511.00	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Bintang Utara	7,974,644,963.00	
7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Tanjung Uban Utara	471,300,000.00	
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Tanjung Uban Timur	256,259,500.00	
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Tanjung Uban Kota	587,670,500.00	
7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Tanjung Uban Selatan	375,595,100.00	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Bintang Pesisir	3,792,589,215.00	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Tambelan	4,832,674,186.00	
7.01.0.00.0.00.03.0001	Kelurahan Teluk Sekuni	333,280,000.00	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Mantang	3,329,369,846.00	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Toapaya	4,932,182,579.00	
7.01.0.00.0.00.05.0001	Kelurahan Toapaya Asri	431,927,500.00	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Teluk Sebong	4,524,539,585.00	
7.01.0.00.0.00.06.0001	Kelurahan Kota Baru	330,642,500.00	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Teluk Bintang	4,475,358,453.00	
7.01.0.00.0.00.07.0001	Kelurahan Tembeling Tanjung	467,500,000.00	
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Gunung Kijang	4,886,277,401.00	

Kode	Nama Perangkat Daerah / Unit Kerja	Plafon Anggaran Sementara	Ket
7.01.0.00.0.00.08.0001	Kelurahan Kawal	420,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Bintan Timur	9,383,203,514.00	
7.01.0.00.0.00.09.0001	Kelurahan Sungai Enam	410,285,000.00	
7.01.0.00.0.00.09.0002	Kelurahan Sungai Lekop	607,000,000.00	
7.01.0.00.0.00.09.0003	Kelurahan Kijang Kota	1,238,212,500.00	
7.01.0.00.0.00.09.0004	Kelurahan Gunung Lengkuas	449,026,500.00	
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Seri Kuala Lobam	5,687,207,749.00	
7.01.0.00.0.00.10.0001	Kelurahan Tanjung Permai	410,827,000.00	
7.01.0.00.0.00.10.0002	Kelurahan Teluk Lobam	385,285,000.00	
8.01.1.05.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	23,142,759,392.00	
TOTAL		1,174,837,834,343.00	

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Pengalokasian anggaran, dengan mempertimbangkan potensi kemampuan keuangan daerah, untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024, secara Urusan, program, dan kegiatan adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel IV.2.
Plafon Anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan
Tahun Anggaran 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Dinas Pendidikan	281,281,176,934.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	281,281,176,934.00	
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	281,281,176,934.00	
1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	195,182,210,684.00	
1.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	171,797,499.00	
1.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000.00	
1.01.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	
1.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121,797,499.00	
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	191,052,863,185.00	
1.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	190,972,863,185.00	
1.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30,000,000.00	
1.01.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000.00	
1.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	60,000,000.00	
1.01.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	30,000,000.00	
1.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30,000,000.00	
1.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114,304,299.00	
1.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
1.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	114,304,299.00	
1.01.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	737,452,900.00	
1.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,000,000.00	
1.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,000,000.00	
1.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40,000,000.00	
1.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	219,452,900.00	
1.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80,000,000.00	
1.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240,000,000.00	
1.01.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	
1.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179,242,801.00	
1.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	27,838,800.00	
1.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151,404,001.00	
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,629,590,000.00	
1.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,850,000.00	
1.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	390,000,000.00	
1.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,235,740,000.00	
1.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,236,960,000.00	
1.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,000,000.00	
1.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90,000,000.00	
1.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000.00	
1.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,006,960,000.00	
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	85,828,966,250.00	
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	44,161,103,800.00	
1.01.02.2.01.0003.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	
1.01.02.2.01.0004.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,200,000,000.00	
1.01.02.2.01.0005.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,440,000,000.00	
1.01.02.2.01.0006.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,570,000,000.00	
1.01.02.2.01.0007.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	
1.01.02.2.01.0009.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	
1.01.02.2.01.0010.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	
1.01.02.2.01.0011.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	168,734,000.00	
1.01.02.2.01.0013.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	
1.01.02.2.01.0014.	Pengadaan Mebel Sekolah	-	
1.01.02.2.01.0016.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	
1.01.02.2.01.0021.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	-	
1.01.02.2.01.0022.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	-	
1.01.02.2.01.0025.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100,000,000.00	
1.01.02.2.01.0026.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4,832,000,000.00	
1.01.02.2.01.0027.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	350,000,000.00	
1.01.02.2.01.0029.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	20,467,400,000.00	
1.01.02.2.01.0030.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	182,000,000.00	
1.01.02.2.01.0038.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	
1.01.02.2.01.0046.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3,758,734,800.00	
1.01.02.2.01.0047.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2,230,000,000.00	
1.01.02.2.01.0048.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.0050.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	7,562,235,000.00	
1.01.02.2.01.0051.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	200,000,000.00	
1.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	28,147,640,750.00	
1.01.02.2.02.0003.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	
1.01.02.2.02.0004.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	
1.01.02.2.02.0005.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	
1.01.02.2.02.0006.	Pembangunan Laboratorium	3,353,390,250.00	
1.01.02.2.02.0007.	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	-	
1.01.02.2.02.0009.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	
1.01.02.2.02.0012.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	635,000,000.00	
1.01.02.2.02.0014.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	
1.01.02.2.02.0016.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	
1.01.02.2.02.0017.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	
1.01.02.2.02.0018.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	-	
1.01.02.2.02.0021.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	-	
1.01.02.2.02.0023.	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	-	
1.01.02.2.02.0024.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	170,000,000.00	
1.01.02.2.02.0025.	Pengadaan Mebel Sekolah	-	
1.01.02.2.02.0027.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	
1.01.02.2.02.0032.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	-	
1.01.02.2.02.0035.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	-	
1.01.02.2.02.0038.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100,000,000.00	
1.01.02.2.02.0039.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2,345,600,000.00	
1.01.02.2.02.0040.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	300,000,000.00	
1.01.02.2.02.0042.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11,463,120,000.00	
1.01.02.2.02.0043.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	90,000,000.00	
1.01.02.2.02.0051.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	
1.01.02.2.02.0058.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3,057,888,950.00	
1.01.02.2.02.0059.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2,715,636,750.00	
1.01.02.2.02.0062.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3,917,004,800.00	
1.01.02.2.02.0064.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11,937,971,700.00	
1.01.02.2.03.0002.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	445,000,000.00	
1.01.02.2.03.0003.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	350,000,000.00	
1.01.02.2.03.0004.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	
1.01.02.2.03.0007.	Pengadaan Mebel PAUD	-	
1.01.02.2.03.0008.	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	-	
1.01.02.2.03.0009.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	-	
1.01.02.2.03.0012.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	308,013,000.00	
1.01.02.2.03.0013.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	150,000,000.00	
1.01.02.2.03.0015.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4,977,600,000.00	
1.01.02.2.03.0016.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	100,000,000.00	
1.01.02.2.03.0017.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	450,000,000.00	
1.01.02.2.03.0018.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3,479,460,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.03.0025.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	
1.01.02.2.03.0030.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	100,000,000.00	
1.01.02.2.03.0041.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1,577,898,700.00	
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,582,250,000.00	
1.01.02.2.04.0001.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	-	
1.01.02.2.04.0010.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	-	
1.01.02.2.04.0011.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	-	
1.01.02.2.04.0014.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	32,000,000.00	
1.01.02.2.04.0015.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	
1.01.02.2.04.0016.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	
1.01.02.2.04.0017.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1,400,250,000.00	
1.01.02.2.04.0027.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	
1.01.02.2.04.0040.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	
1.01.02.2.04.0046.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	150,000,000.00	
1.01.02.2.04.0048.	Pengadaan Mebel Sekolah	-	
1.01.02.2.04.0050.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	
1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	190,000,000.00	
1.01.03.2.01.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	170,000,000.00	
1.01.03.2.01.0003.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20,000,000.00	
1.01.03.2.01.0004.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	150,000,000.00	
1.01.03.2.02.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20,000,000.00	
1.01.03.2.02.0003.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20,000,000.00	
1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	80,000,000.00	
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	80,000,000.00	
1.01.04.2.01.0001.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40,000,000.00	
1.01.04.2.01.0002.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40,000,000.00	
	Dinas Kesehatan	139,778,562,400.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	139,778,562,400.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	139,778,562,400.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108,353,238,456.00	
1.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220,000,000.00	
1.02.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120,000,000.00	
1.02.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000.00	
1.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	101,313,045,239.00	
1.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	101,233,045,239.00	
1.02.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80,000,000.00	
1.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50,000,000.00	
1.02.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50,000,000.00	
1.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	
1.02.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	
1.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	919,298,848.00	
1.02.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52,500,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220,500,000.00	
1.02.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	109,716,301.00	
1.02.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250,460,547.00	
1.02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40,000,000.00	
1.02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	246,122,000.00	
1.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188,000,000.00	
1.02.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	
1.02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88,000,000.00	
1.02.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000.00	
1.02.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,128,394,369.00	
1.02.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	
1.02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	385,400,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,737,994,369.00	
1.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534,500,000.00	
1.02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29,700,000.00	
1.02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47,800,000.00	
1.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47,000,000.00	
1.02.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	360,000,000.00	
1.02.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	24,802,265,971.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7,188,605,168.00	
1.02.02.2.01.0003.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	400,000,000.00	
1.02.02.2.01.0006.	Pengembangan Puskesmas	-	
1.02.02.2.01.0007.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	200,000,000.00	
1.02.02.2.01.0009.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-	
1.02.02.2.01.0010.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	400,000,000.00	
1.02.02.2.01.0011.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	-	
1.02.02.2.01.0014.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	586,573,000.00	
1.02.02.2.01.0020.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	
1.02.02.2.01.0023.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5,602,032,168.00	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17,373,660,803.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	199,933,398.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25,000,000.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	111,730,000.00	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	58,239,555.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	45,000,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	15,000,000.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15,000,000.00	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	30,000,000.00	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	30,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10,000,000.00	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	30,000,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	20,000,000.00	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	150,000,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	40,000,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	63,783,960.00	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	85,561,730.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100,000,000.00	
1.02.02.2.02.0019.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	50,000,000.00	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	98,622,400.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	58,319,840.00	
1.02.02.2.02.0024.	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100,000,000.00	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	847,132,000.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14,216,278,800.00	
1.02.02.2.02.0029.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	200,000,000.00	
1.02.02.2.02.0034.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	330,000,000.00	
1.02.02.2.02.0035.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	101,568,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	74,130,400.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	178,360,720.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	20,000,000.00	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	20,000,000.00	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	50,000,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	200,000,000.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	200,000,000.00	
1.02.02.2.04.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000.00	
1.02.02.2.04.0004.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	40,000,000.00	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,425,404,900.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	75,000,000.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	40,000,000.00	
1.02.03.2.02.0003.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	35,000,000.00	
1.02.03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,350,404,900.00	
1.02.03.2.03.0001.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,350,404,900.00	
1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	563,364,000.00	
1.02.04.2.01.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	116,598,000.00	
1.02.04.2.01.0001.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	116,598,000.00	
1.02.04.2.02.	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	20,000,000.00	
1.02.04.2.02.0001.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	20,000,000.00	
1.02.04.2.03.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	406,766,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.04.2.03.0001.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	406,766,000.00	
1.02.04.2.04.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	20,000,000.00	
1.02.04.2.04.0001.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	20,000,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4,634,289,073.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	-	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4,634,289,073.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,634,289,073.00	
	Puskesmas Berakit	966,310,000.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	966,310,000.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	966,310,000.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	236,400,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236,400,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236,400,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	565,581,000.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	565,581,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24,150,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3,600,000.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3,600,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6,750,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6,600,000.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8,850,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	42,442,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11,550,000.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6,000,000.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	96,525,000.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	152,562,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	-	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	170,927,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	22,875,000.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	9,150,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	71,584,000.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	71,584,000.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	71,584,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	92,745,000.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67,695,000.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	67,695,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25,050,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25,050,000.00	
	Puskesmas Toapaya	1,610,371,991.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,610,371,991.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,610,371,991.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73,760,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73,760,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73,760,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,273,329,991.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,273,329,991.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	56,125,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12,100,000.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	-	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	41,325,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12,777,211.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13,050,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	159,409,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11,471,000.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32,999,578.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	136,029,211.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	498,150,000.00	
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4,500,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	222,288,991.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	64,105,000.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	9,000,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	134,812,000.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	134,812,000.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	134,812,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	128,470,000.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123,145,000.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	123,145,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5,325,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5,325,000.00	
	PPK BLUD PUSKESMAS TELUK SASAH	1,650,395,000.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,650,395,000.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,650,395,000.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	669,420,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211,940,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	211,940,000.00	
1.02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	457,480,000.00	
1.02.01.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	457,480,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	761,457,000.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	761,457,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69,825,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18,666,000.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7,962,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14,175,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10,680,000.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10,650,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	232,262,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18,192,000.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9,000,000.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	139,210,000.00	
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1,500,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	188,364,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	34,971,000.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	6,000,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	116,936,000.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	116,936,000.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	116,936,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	102,582,000.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90,750,000.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	90,750,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11,832,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11,832,000.00	
	PPK BLUD PUSKESMAS KIJANG	2,542,876,000.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,542,876,000.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,542,876,000.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,229,860,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223,840,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223,840,000.00	
1.02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,006,020,000.00	
1.02.01.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,006,020,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	854,914,110.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	854,914,110.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	55,184,610.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5,100,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	13,530,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20,400,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12,975,000.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3,300,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	283,098,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20,250,000.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6,060,000.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	171,073,500.00	
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4,500,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	171,243,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	57,900,000.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	30,300,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	179,502,000.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	179,502,000.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	179,502,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	278,599,890.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180,509,890.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	180,509,890.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98,090,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	98,090,000.00	
	PPK BLUD PUSKESMAS TANJUNG UBAN	3,085,677,000.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3,085,677,000.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3,085,677,000.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,458,800,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539,250,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539,250,000.00	
1.02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	919,550,000.00	
1.02.01.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	919,550,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,249,073,000.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,249,073,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	130,000,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10,245,000.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1,500,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	67,500,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	29,400,000.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13,200,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	263,581,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15,150,000.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12,120,000.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	209,325,000.00	
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	750,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	375,177,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	31,125,000.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	90,000,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	214,375,000.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	214,375,000.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	214,375,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	163,429,000.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102,300,000.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	102,300,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61,129,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	61,129,000.00	
	PUSKESMAS SEI LEKOP	1,648,556,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,648,556,000.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,648,556,000.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	148,460,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148,460,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148,460,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,238,642,000.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,238,642,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47,250,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6,450,000.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	32,250,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20,700,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10,650,000.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1,425,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1,500,000.00	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	166,818,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24,450,000.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7,650,000.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	171,375,000.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	477,362,000.00	
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	18,750,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	193,362,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	34,200,000.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	24,450,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	136,804,000.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	136,804,000.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	136,804,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	124,650,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93,900,000.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	93,900,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,750,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30,750,000.00	
	PUSKESMAS NUMBING	1,075,866,566.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,075,866,566.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,075,866,566.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	394,500,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394,500,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	394,500,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	581,415,000.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	581,415,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68,250,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	600,000.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	-	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19,100,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	21,725,000.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14,700,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13,404,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14,900,000.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15,090,000.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	78,050,000.00	
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	-	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	310,146,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	18,800,000.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	6,650,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	70,862,566.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	70,862,566.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	70,862,566.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	29,089,000.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26,639,000.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	26,639,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,450,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2,450,000.00	
	PUSKESMAS KELONG	1,503,320,500.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,503,320,500.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,503,320,500.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	259,760,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259,760,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259,760,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,038,374,128.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,038,374,128.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	65,175,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6,900,000.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	5,400,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23,001,992.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11,370,000.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3,000,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36,641,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19,864,242.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12,857,624.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	101,650,530.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	370,636,500.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	7,872,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	308,828,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	55,151,000.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10,026,240.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	118,323,000.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	118,323,000.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	118,323,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	86,863,372.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43,498,372.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	43,498,372.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43,365,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	43,365,000.00	
	PPK BLUD PUSKESMAS KAWAL	2,280,964,000.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,280,964,000.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,280,964,000.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,128,600,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484,200,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	484,200,000.00	
1.02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	644,400,000.00	
1.02.01.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	644,400,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	848,829,000.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	848,829,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	67,862,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16,920,000.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23,460,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15,300,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9,600,000.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16,200,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	200,973,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13,800,000.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6,840,000.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	110,175,000.00	
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2,325,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	231,574,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	81,000,000.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52,800,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	150,085,000.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	150,085,000.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	150,085,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	153,450,000.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70,350,000.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	70,350,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83,100,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	83,100,000.00	
	PUSKESMAS TELUK BINTAN	1,347,452,000.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,347,452,000.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,347,452,000.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	206,460,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206,460,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206,460,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	879,735,000.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	879,735,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75,900,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8,350,000.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	18,900,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38,400,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11,550,000.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5,400,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	38,061,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9,000,000.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4,877,000.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	63,750,000.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	339,500,000.00	
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	750,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	227,497,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	29,400,000.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	8,400,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	115,382,000.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	115,382,000.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	115,382,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	145,875,000.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145,875,000.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	145,875,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	
	PUSKESMAS SRI BINTAN	1,400,705,500.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,400,705,500.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,400,705,500.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	151,200,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151,200,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	151,200,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,004,051,040.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,004,051,040.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38,930,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	57,989,620.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47,825,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6,685,500.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4,490,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	98,091,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27,965,000.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1,500,000.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	114,288,500.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	310,538,000.00	
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	900,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	252,977,500.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	35,330,920.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	6,540,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	134,601,000.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	134,601,000.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	134,601,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	110,853,460.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78,278,040.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	78,278,040.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32,575,420.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	32,575,420.00	
	PUSKESMAS TAMBELAN	2,293,281,458.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,293,281,458.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,293,281,458.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	638,210,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	638,210,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	638,210,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,434,216,458.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,434,216,458.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94,700,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9,000,000.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	6,120,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18,900,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19,660,000.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16,980,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63,969,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36,450,000.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	31,920,000.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	161,100,000.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	412,309,000.00	
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3,500,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	493,508,458.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	44,200,000.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	21,900,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	125,040,000.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	125,040,000.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	125,040,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	95,815,000.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68,815,000.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	68,815,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27,000,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	27,000,000.00	
	PUSKESMAS KUALA SEMPANG	1,462,722,000.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,462,722,000.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,462,722,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	156,300,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156,300,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156,300,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	991,796,508.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	991,796,508.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93,576,284.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14,013,000.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7,910,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21,140,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19,052,224.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11,400,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	118,727,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16,500,000.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12,225,000.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	52,751,000.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	384,200,000.00	
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1,800,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	198,042,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	38,060,000.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2,400,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	135,350,000.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	135,350,000.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	135,350,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	179,275,492.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	155,585,492.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	155,585,492.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23,690,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	23,690,000.00	
	PUSKESMAS MANTANG	1,683,985,000.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,683,985,000.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1,683,985,000.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	535,240,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535,240,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	535,240,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	973,377,000.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	973,377,000.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	29,800,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11,950,000.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	24,950,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40,175,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	24,000,000.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15,275,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	47,485,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28,325,000.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40,300,000.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	121,550,000.00	
1.02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	226,000,000.00	
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	-	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	317,617,000.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	40,450,000.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5,500,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	117,930,000.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	117,930,000.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	117,930,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	57,438,000.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57,438,000.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	57,438,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	
	PPK BLUD TELUK SEBONG	2,723,057,500.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,723,057,500.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2,723,057,500.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,807,950,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407,950,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407,950,000.00	
1.02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	1,400,000,000.00	
1.02.01.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,400,000,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	677,525,500.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.01.0024.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	677,525,500.00	
1.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45,375,000.00	
1.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	900,000.00	
1.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	
1.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	20,275,000.00	
1.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24,075,000.00	
1.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	17,550,000.00	
1.02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	-	
1.02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	
1.02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	
1.02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	
1.02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12,323,000.00	
1.02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	
1.02.02.2.02.0013.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	
1.02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	113,954,000.00	
1.02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	
1.02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20,775,000.00	
1.02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	
1.02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3,500,000.00	
1.02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	
1.02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	90,225,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2,025,000.00	
1.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	256,498,500.00	
1.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	67,050,000.00	
1.02.02.2.02.0037.	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3,000,000.00	
1.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	
1.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	
1.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	113,782,000.00	
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	113,782,000.00	
1.02.03.2.02.0002.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	113,782,000.00	
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	123,800,000.00	
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83,275,000.00	
1.02.05.2.02.0001.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	83,275,000.00	
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40,525,000.00	
1.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	40,525,000.00	
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	36,407,165,438.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	36,407,165,438.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	36,407,165,438.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29,812,500,000.00	
1.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00	
1.02.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	
1.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	
1.02.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	
1.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000.00	
1.02.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000.00	
1.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250,000,000.00	
1.02.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250,000,000.00	
1.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	
1.02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	
1.02.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,252,500,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,252,500,000.00	
1.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200,000,000.00	
1.02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,000,000.00	
1.02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,000,000.00	
1.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000.00	
1.02.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	
1.02.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
1.02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	24,000,000,000.00	
1.02.01.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	24,000,000,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	6,494,665,438.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,861,351,412.00	
1.02.02.2.01.0008.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-	
1.02.02.2.01.0014.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	322,210,000.00	
1.02.02.2.01.0020.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100,000,000.00	
1.02.02.2.01.0022.	Pengembangan Rumah Sakit	350,000,000.00	
1.02.02.2.01.0023.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1,089,141,412.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4,433,314,026.00	
1.02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100,000,000.00	
1.02.02.2.02.0024.	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	50,000,000.00	
1.02.02.2.02.0032.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4,233,314,026.00	
1.02.02.2.02.0035.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100,000,000.00	
1.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100,000,000.00	
1.02.02.2.04.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
1.02.02.2.04.0002.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.04.0003.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	50,000,000.00	
1.02.02.2.04.0004.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	50,000,000.00	
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100,000,000.00	
1.02.03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
1.02.03.2.03.0001.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
	UPT BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALKES	253,981,832.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	253,981,832.00	
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	253,981,832.00	
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36,000,000.00	
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36,000,000.00	
1.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,000,000.00	
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	217,981,832.00	
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	77,981,832.00	
1.02.02.2.01.0026.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	77,981,832.00	
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140,000,000.00	
1.02.02.2.02.0034.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	140,000,000.00	
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	51,497,704,689.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	50,097,704,689.00	
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50,097,704,689.00	
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,352,696,739.00	
1.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175,000,000.00	
1.03.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75,000,000.00	
1.03.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000.00	
1.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,609,946,739.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,544,946,739.00	
1.03.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65,000,000.00	
1.03.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40,000,000.00	
1.03.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40,000,000.00	
1.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54,000,000.00	
1.03.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54,000,000.00	
1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,260,000,000.00	
1.03.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000.00	
1.03.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,000,000.00	
1.03.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85,000,000.00	
1.03.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250,000,000.00	
1.03.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000.00	
1.03.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	525,000,000.00	
1.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15,000,000.00	
1.03.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000.00	
1.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	763,750,000.00	
1.03.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000.00	
1.03.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250,000,000.00	
1.03.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	506,250,000.00	
1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435,000,000.00	
1.03.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150,000,000.00	
1.03.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,000,000.00	
1.03.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185,000,000.00	
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	976,701,950.00	
1.03.02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	976,701,950.00	
1.03.02.2.01.0071.	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	296,701,950.00	
1.03.02.2.01.0093.	Normalisasi/Restorasi Sungai	100,000,000.00	
1.03.02.2.01.0120.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	580,000,000.00	
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1,545,000,000.00	
1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1,545,000,000.00	
1.03.03.2.01.0025.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200,000,000.00	
1.03.03.2.01.0026.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	270,000,000.00	
1.03.03.2.01.0029.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1,075,000,000.00	
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	950,000,000.00	
1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	950,000,000.00	
1.03.05.2.01.0038.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	800,000,000.00	
1.03.05.2.01.0039.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	150,000,000.00	
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2,375,000,000.00	
1.03.06.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,375,000,000.00	
1.03.06.2.01.0028.	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	555,000,000.00	
1.03.06.2.01.0029.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1,070,000,000.00	
1.03.06.2.01.0031.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	750,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3,395,180,000.00	
1.03.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3,395,180,000.00	
1.03.08.2.01.0018.	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1,595,180,000.00	
1.03.08.2.01.0021.	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1,475,000,000.00	
1.03.08.2.01.0022.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	75,000,000.00	
1.03.08.2.01.0023.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	250,000,000.00	
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	28,187,206,000.00	
1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	28,187,206,000.00	
1.03.10.2.01.0032.	Pembangunan Jalan	1,500,000,000.00	
1.03.10.2.01.0033.	Rekonstruksi Jalan	320,000,000.00	
1.03.10.2.01.0034.	Pemeliharaan Berkala Jalan	16,586,874,560.00	
1.03.10.2.01.0038.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	250,000,000.00	
1.03.10.2.01.0040.	Pembangunan Jembatan	7,114,128,000.00	
1.03.10.2.01.0043.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	525,000,000.00	
1.03.10.2.01.0046.	Pemeliharaan Rutin Jalan	1,891,203,440.00	
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	475,000,000.00	
1.03.11.2.01.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100,000,000.00	
1.03.11.2.01.0010.	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	30,000,000.00	
1.03.11.2.01.0016.	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	70,000,000.00	
1.03.11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000.00	
1.03.11.2.02.0015.	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	300,000,000.00	
1.03.11.2.04.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	75,000,000.00	
1.03.11.2.04.0004.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	75,000,000.00	
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	840,920,000.00	
1.03.12.2.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	590,920,000.00	
1.03.12.2.02.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	590,920,000.00	
1.03.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000.00	
1.03.12.2.03.0005.	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	150,000,000.00	
1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
1.03.12.2.04.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100,000,000.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,400,000,000.00	
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1,400,000,000.00	
2.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100,000,000.00	
2.10.04.2.01.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
2.10.04.2.01.0002.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
2.10.05.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1,300,000,000.00	
2.10.05.2.01.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,300,000,000.00	
2.10.05.2.01.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,300,000,000.00	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	33,466,435,438.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	33,466,435,438.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	DASAR		
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	33,466,435,438.00	
1.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,070,601,078.00	
1.04.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000.00	
1.04.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,000,000.00	
1.04.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,182,990,993.00	
1.04.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,175,490,993.00	
1.04.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,500,000.00	
1.04.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7,500,000.00	
1.04.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,500,000.00	
1.04.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90,000,000.00	
1.04.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
1.04.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90,000,000.00	
1.04.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	727,776,744.00	
1.04.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44,000,000.00	
1.04.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110,000,000.00	
1.04.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400,000,000.00	
1.04.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000.00	
1.04.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123,776,744.00	
1.04.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114,053,419.00	
1.04.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114,053,419.00	
1.04.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
1.04.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,373,279,922.00	
1.04.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	
1.04.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,809,279,922.00	
1.04.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	554,000,000.00	
1.04.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475,000,000.00	
1.04.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200,000,000.00	
1.04.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75,000,000.00	
1.04.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000.00	
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	530,000,000.00	
1.04.02.2.01.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
1.04.02.2.01.0002.	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	
1.04.02.2.01.0003.	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	-	
1.04.02.2.01.0004.	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	25,000,000.00	
1.04.02.2.01.0006.	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	-	
1.04.02.2.01.0007.	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	25,000,000.00	
1.04.02.2.01.0008.	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	
1.04.02.2.02.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	
1.04.02.2.02.0001.	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	-	
1.04.02.2.02.0004.	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	-	
1.04.02.2.02.0006.	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.02.2.02.0008.	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	
1.04.02.2.02.0009.	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	-	
1.04.02.2.02.0010.	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	-	
1.04.02.2.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	400,000,000.00	
1.04.02.2.03.0001.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	150,000,000.00	
1.04.02.2.03.0004.	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	250,000,000.00	
1.04.02.2.03.0006.	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	
1.04.02.2.03.0007.	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	
1.04.02.2.03.0011.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	
1.04.02.2.04.	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	
1.04.02.2.04.0003.	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	
1.04.02.2.04.0004.	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	
1.04.02.2.05.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	
1.04.02.2.05.0001.	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	-	
1.04.02.2.05.0002.	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	
1.04.02.2.06.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50,000,000.00	
1.04.02.2.06.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	-	
1.04.02.2.06.0002.	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	-	
1.04.02.2.06.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50,000,000.00	
1.04.02.2.06.0004.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	-	
1.04.02.2.07.	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	30,000,000.00	
1.04.02.2.07.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	30,000,000.00	
1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	499,800,000.00	
1.04.03.2.01.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	499,800,000.00	
1.04.03.2.01.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	-	
1.04.03.2.01.0004.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	499,800,000.00	
1.04.03.2.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	
1.04.03.2.02.0004.	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	-	
1.04.03.2.02.0008.	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	-	
1.04.03.2.02.0011.	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	
1.04.03.2.02.0012.	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	-	
1.04.03.2.02.0013.	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	-	
1.04.03.2.02.0014.	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-	
1.04.03.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	
1.04.03.2.03.0002.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	-	
1.04.03.2.03.0003.	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	-	
1.04.03.2.03.0004.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-	
1.04.03.2.03.0007.	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.03.2.03.0010.	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	
1.04.03.2.03.0012.	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	
1.04.03.2.03.0013.	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	-	
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1,000,000,000.00	
1.04.04.2.01.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1,000,000,000.00	
1.04.04.2.01.0001.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1,000,000,000.00	
1.04.04.2.01.0009.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	-	
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	18,336,034,360.00	
1.04.05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	18,336,034,360.00	
1.04.05.2.01.0001.	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	-	
1.04.05.2.01.0002.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	18,286,034,360.00	
1.04.05.2.01.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50,000,000.00	
1.04.05.2.01.0010.	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	-	
1.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30,000,000.00	
1.04.06.2.01.	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	30,000,000.00	
1.04.06.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	30,000,000.00	
	Satuan Polisi Pamong Praja	17,300,968,891.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17,300,968,891.00	
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17,300,968,891.00	
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,700,968,891.00	
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65,000,000.00	
1.05.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000.00	
1.05.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,000,000.00	
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,721,557,675.00	
1.05.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,706,557,675.00	
1.05.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15,000,000.00	
1.05.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,000,000.00	
1.05.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,000,000.00	
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000.00	
1.05.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
1.05.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000.00	
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	493,511,216.00	
1.05.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	
1.05.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85,511,216.00	
1.05.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23,000,000.00	
1.05.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	210,000,000.00	
1.05.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,000,000.00	
1.05.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135,000,000.00	
1.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	215,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	45,000,000.00	
1.05.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170,000,000.00	
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,900,900,000.00	
1.05.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	
1.05.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104,000,000.00	
1.05.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,794,900,000.00	
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190,000,000.00	
1.05.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95,000,000.00	
1.05.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000.00	
1.05.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70,000,000.00	
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	600,000,000.00	
1.05.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	525,000,000.00	
1.05.02.2.01.0003.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	60,000,000.00	
1.05.02.2.01.0004.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	210,000,000.00	
1.05.02.2.01.0005.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	105,000,000.00	
1.05.02.2.01.0006.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,000,000.00	
1.05.02.2.01.0015.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	85,000,000.00	
1.05.02.2.01.0017.	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	25,000,000.00	
1.05.02.2.01.0018.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	25,000,000.00	
1.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	75,000,000.00	
1.05.02.2.02.0011.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	20,000,000.00	
1.05.02.2.02.0012.	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	55,000,000.00	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11,379,677,050.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,280,601,027.00	
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2,280,601,027.00	
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,215,056,055.00	
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128,268,032.00	
1.05.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33,268,032.00	
1.05.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,000,000.00	
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,134,076,023.00	
1.05.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,099,076,023.00	
1.05.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35,000,000.00	
1.05.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,030,000.00	
1.05.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,030,000.00	
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,326,000.00	
1.05.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
1.05.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45,326,000.00	
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	342,550,000.00	
1.05.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,300,000.00	
1.05.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,250,000.00	
1.05.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	179,000,000.00	
1.05.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,000,000.00	
1.05.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110,000,000.00	
1.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33,735,000.00	
1.05.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	27,735,000.00	
1.05.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,000,000.00	
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377,071,000.00	
1.05.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390,000.00	
1.05.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64,681,000.00	
1.05.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312,000,000.00	
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150,000,000.00	
1.05.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21,000,000.00	
1.05.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110,000,000.00	
1.05.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,000,000.00	
1.05.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	794,698,995.00	
1.05.03.2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	25,000,000.00	
1.05.03.2.01.0004.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	25,000,000.00	
1.05.03.2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	230,700,000.00	
1.05.03.2.02.0006.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	30,000,000.00	
1.05.03.2.02.0008.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	
1.05.03.2.02.0009.	Penyusunan Rencana Kontijensi	25,000,000.00	
1.05.03.2.02.0010.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	20,000,000.00	
1.05.03.2.02.0011.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	-	
1.05.03.2.02.0013.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	
1.05.03.2.02.0015.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	23,700,000.00	
1.05.03.2.02.0016.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	40,000,000.00	
1.05.03.2.02.0017.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	92,000,000.00	
1.05.03.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	430,748,000.00	
1.05.03.2.03.0001.	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	-	
1.05.03.2.03.0002.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	176,548,000.00	
1.05.03.2.03.0003.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	
1.05.03.2.03.0009.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	254,200,000.00	
1.05.03.2.03.0010.	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	-	
1.05.03.2.03.0011.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	
1.05.03.2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	108,250,995.00	
1.05.03.2.04.0001.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	
1.05.03.2.04.0002.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	
1.05.03.2.04.0003.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	43,250,995.00	
1.05.03.2.04.0004.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	15,000,000.00	
1.05.03.2.04.0010.	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	50,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	369,922,000.00	
1.05.04.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	329,922,000.00	
1.05.04.2.01.0002.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	219,922,000.00	
1.05.04.2.01.0003.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-	
1.05.04.2.01.0004.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.05.04.2.01.0005.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	-	
1.05.04.2.01.0007.	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	
1.05.04.2.01.0017.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	110,000,000.00	
1.05.04.2.01.0018.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	
1.05.04.2.02.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	
1.05.04.2.02.0001.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	
1.05.04.2.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	40,000,000.00	
1.05.04.2.04.0001.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	-	
1.05.04.2.04.0002.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	40,000,000.00	
1.05.04.2.04.0003.	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	-	
1.05.04.2.05.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	
1.05.04.2.05.0001.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	-	
1.05.04.2.05.0004.	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	
1.05.04.2.05.0005.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	
	Dinas Sosial	16,309,866,001.00	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16,309,866,001.00	
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	16,309,866,001.00	
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,963,823,732.00	
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,000,000.00	
1.06.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,000,000.00	
1.06.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000.00	
1.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,772,226,641.00	
1.06.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,763,254,641.00	
1.06.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8,972,000.00	
1.06.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,000,000.00	
1.06.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,000,000.00	
1.06.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19,000,000.00	
1.06.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
1.06.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19,000,000.00	
1.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	341,045,666.00	
1.06.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,049,139.00	
1.06.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,000,000.00	
1.06.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,705,527.00	
1.06.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128,021,000.00	
1.06.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116,270,000.00	
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139,385,425.00	
1.06.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	92,000,000.00	
1.06.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47,385,425.00	
1.06.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446,600,000.00	
1.06.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	
1.06.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	231,600,000.00	
1.06.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210,000,000.00	
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150,566,000.00	
1.06.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,750,000.00	
1.06.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,000,000.00	
1.06.01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	4,816,000.00	
1.06.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000.00	
1.06.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,659,478,938.00	
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,659,478,938.00	
1.06.02.2.03.0001.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	138,201,930.00	
1.06.02.2.03.0002.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	55,500,000.00	
1.06.02.2.03.0004.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1,431,378,008.00	
1.06.02.2.03.0005.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	34,399,000.00	
1.06.03.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	61,600,000.00	
1.06.03.2.01.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	61,600,000.00	
1.06.03.2.01.0001.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	61,600,000.00	
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	799,021,248.00	
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	676,957,500.00	
1.06.04.2.01.0001.	Penyediaan Permakanan	288,000,000.00	
1.06.04.2.01.0002.	Penyediaan Sandang	-	
1.06.04.2.01.0003.	Penyediaan Alat Bantu	-	
1.06.04.2.01.0005.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	102,160,000.00	
1.06.04.2.01.0008.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	75,597,500.00	
1.06.04.2.01.0009.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	-	
1.06.04.2.01.0010.	Pemberian Layanan Kedaruratan	211,200,000.00	
1.06.04.2.01.0011.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	
1.06.04.2.01.0012.	Pemberian Layanan Rujukan	-	
1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	122,063,748.00	
1.06.04.2.02.0001.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2,247,748.00	
1.06.04.2.02.0004.	Penyediaan Sandang	-	
1.06.04.2.02.0007.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	85,416,000.00	
1.06.04.2.02.0013.	Pemberian Layanan Rujukan	34,400,000.00	
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	8,354,574,506.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8,354,574,506.00	
1.06.05.2.02.0001.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	523,400,000.00	
1.06.05.2.02.0003.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	7,034,078,575.00	
1.06.05.2.02.0004.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	797,095,931.00	
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	409,447,940.00	
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	103,447,940.00	
1.06.06.2.01.0001.	Penyediaan Makanan	68,802,040.00	
1.06.06.2.01.0002.	Penyediaan Sandang	34,645,900.00	
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	306,000,000.00	
1.06.06.2.02.0002.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	306,000,000.00	
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	61,919,637.00	
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	61,919,637.00	
1.06.07.2.01.0001.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	
1.06.07.2.01.0002.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	61,919,637.00	
	Dinas Tenaga Kerja	5,627,249,419.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5,627,249,419.00	
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5,627,249,419.00	
2.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,781,236,519.00	
2.07.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42,719,100.00	
2.07.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,470,000.00	
2.07.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,249,100.00	
2.07.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,050,899,419.00	
2.07.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,027,709,419.00	
2.07.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23,190,000.00	
2.07.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47,000,000.00	
2.07.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47,000,000.00	
2.07.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254,878,000.00	
2.07.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,552,000.00	
2.07.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29,626,000.00	
2.07.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	118,000,000.00	
2.07.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,000,000.00	
2.07.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86,700,000.00	
2.07.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,500,000.00	
2.07.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	13,000,000.00	
2.07.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,500,000.00	
2.07.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298,640,000.00	
2.07.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900,000.00	
2.07.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92,000,000.00	
2.07.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205,740,000.00	
2.07.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,600,000.00	
2.07.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,000,000.00	
2.07.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,600,000.00	
2.07.02.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	76,272,700.00	
2.07.02.2.01.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	76,272,700.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.02.2.01.0001.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	76,272,700.00	
2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	870,077,200.00	
2.07.03.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	825,000,000.00	
2.07.03.2.01.0001.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	825,000,000.00	
2.07.03.2.02.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	17,949,000.00	
2.07.03.2.02.0001.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	17,949,000.00	
2.07.03.2.04.	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	27,128,200.00	
2.07.03.2.04.0001.	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	27,128,200.00	
2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	54,663,000.00	
2.07.04.2.01.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	54,663,000.00	
2.07.04.2.01.0003.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	40,080,000.00	
2.07.04.2.01.0004.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	14,583,000.00	
2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	845,000,000.00	
2.07.05.2.01.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000.00	
2.07.05.2.01.0001.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	25,000,000.00	
2.07.05.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	50,000,000.00	
2.07.05.2.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	770,000,000.00	
2.07.05.2.02.0002.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	
2.07.05.2.02.0003.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	15,000,000.00	
2.07.05.2.02.0004.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	105,000,000.00	
2.07.05.2.02.0005.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	625,000,000.00	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10,482,797,115.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10,482,797,115.00	
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6,590,278,447.00	
2.08.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,210,861,498.00	
2.08.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145,000,000.00	
2.08.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,000,000.00	
2.08.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110,000,000.00	
2.08.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,453,810,115.00	
2.08.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,434,555,115.00	
2.08.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19,255,000.00	
2.08.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7,500,000.00	
2.08.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,500,000.00	
2.08.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	
2.08.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
2.08.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	
2.08.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	232,159,741.00	
2.08.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000.00	
2.08.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000.00	
2.08.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,000,000.00	
2.08.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81,549,383.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,000,000.00	
2.08.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,610,358.00	
2.08.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,136,000.00	
2.08.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,136,000.00	
2.08.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298,239,000.00	
2.08.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000.00	
2.08.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70,000,000.00	
2.08.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226,739,000.00	
2.08.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,016,642.00	
2.08.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,000,000.00	
2.08.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,000,000.00	
2.08.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,016,642.00	
2.08.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	250,000,000.00	
2.08.02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.08.02.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	-	
2.08.02.2.01.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.08.02.2.01.0003.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	-	
2.08.02.2.01.0004.	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	-	
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	170,000,000.00	
2.08.02.2.02.0001.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	70,000,000.00	
2.08.02.2.02.0002.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100,000,000.00	
2.08.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30,000,000.00	
2.08.02.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30,000,000.00	
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	150,000,000.00	
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000.00	
2.08.03.2.02.0001.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000.00	
2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	250,000,000.00	
2.08.04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000.00	
2.08.04.2.01.0003.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000.00	
2.08.04.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
2.08.04.2.02.0003.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	50,000,000.00	
2.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.08.05.2.01.0001.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	610,577,000.00	
2.08.06.2.01.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45,577,000.00	
2.08.06.2.01.0001.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45,577,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.06.2.01.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	
2.08.06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	565,000,000.00	
2.08.06.2.02.0001.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300,000,000.00	
2.08.06.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35,000,000.00	
2.08.06.2.02.0003.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000.00	
2.08.06.2.02.0004.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000.00	
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	68,839,949.00	
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68,839,949.00	
2.08.07.2.02.0005.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68,839,949.00	
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3,892,518,668.00	
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	413,000,000.00	
2.14.02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	263,000,000.00	
2.14.02.2.01.0018.	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	-	
2.14.02.2.01.0019.	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	-	
2.14.02.2.01.0023.	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	263,000,000.00	
2.14.02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000.00	
2.14.02.2.02.0009.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64,200,000.00	
2.14.02.2.02.0012.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	49,800,000.00	
2.14.02.2.02.0013.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	36,000,000.00	
2.14.02.2.02.0015.	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	-	
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,344,741,000.00	
2.14.03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	909,100,000.00	
2.14.03.2.01.0008.	Pengendalian Program KKBPK	80,000,000.00	
2.14.03.2.01.0010.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	469,100,000.00	
2.14.03.2.01.0011.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	130,000,000.00	
2.14.03.2.01.0012.	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150,000,000.00	
2.14.03.2.01.0014.	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80,000,000.00	
2.14.03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	182,000,000.00	
2.14.03.2.02.0004.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	102,000,000.00	
2.14.03.2.02.0005.	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	80,000,000.00	
2.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	998,195,000.00	
2.14.03.2.03.0001.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20,700,000.00	
2.14.03.2.03.0003.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	615,701,000.00	
2.14.03.2.03.0006.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	347,694,000.00	
2.14.03.2.03.0008.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14,100,000.00	
2.14.03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	255,446,000.00	
2.14.03.2.04.0002.	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9,000,000.00	
2.14.03.2.04.0006.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga	246,446,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Berkualitas		
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,134,777,668.00	
2.14.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,134,777,668.00	
2.14.04.2.01.0017.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	172,422,668.00	
2.14.04.2.01.0018.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	360,000,000.00	
2.14.04.2.01.0024.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	602,355,000.00	
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16,506,495,115.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12,522,420,115.00	
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	12,522,420,115.00	
2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,224,420,115.00	
2.09.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82,650,000.00	
2.09.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41,244,000.00	
2.09.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,406,000.00	
2.09.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,533,875,667.00	
2.09.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,518,875,667.00	
2.09.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15,000,000.00	
2.09.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,564,000.00	
2.09.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,564,000.00	
2.09.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000.00	
2.09.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,000,000.00	
2.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	265,000,448.00	
2.09.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000.00	
2.09.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000.00	
2.09.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	
2.09.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,000,000.00	
2.09.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,000,448.00	
2.09.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,000,000.00	
2.09.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130,000,000.00	
2.09.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130,000,000.00	
2.09.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
2.09.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731,480,000.00	
2.09.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	
2.09.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158,400,000.00	
2.09.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	571,080,000.00	
2.09.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464,850,000.00	
2.09.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,000,000.00	
2.09.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20,000,000.00	
2.09.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000.00	
2.09.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	399,850,000.00	
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	252,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	69,000,000.00	
2.09.03.2.01.0002.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	55,000,000.00	
2.09.03.2.01.0015.	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	14,000,000.00	
2.09.03.2.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	33,000,000.00	
2.09.03.2.02.0003.	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	33,000,000.00	
2.09.03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	150,000,000.00	
2.09.03.2.04.0002.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150,000,000.00	
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	21,000,000.00	
2.09.04.2.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	21,000,000.00	
2.09.04.2.02.0002.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21,000,000.00	
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25,000,000.00	
2.09.05.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	
2.09.05.2.01.0007.	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	-	
2.09.05.2.01.0009.	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	25,000,000.00	
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3,984,075,000.00	
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3,984,075,000.00	
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2,130,000,000.00	
3.27.02.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	775,000,000.00	
3.27.02.2.01.0001.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	10,000,000.00	
3.27.02.2.01.0002.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	765,000,000.00	
3.27.02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	690,000,000.00	
3.27.02.2.02.0002.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	250,000,000.00	
3.27.02.2.02.0003.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	440,000,000.00	
3.27.02.2.06.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	665,000,000.00	
3.27.02.2.06.0003.	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	665,000,000.00	
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,193,500,000.00	
3.27.03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	526,000,000.00	
3.27.03.2.01.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6,000,000.00	
3.27.03.2.01.0015.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	520,000,000.00	
3.27.03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	667,500,000.00	
3.27.03.2.02.0009.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	630,000,000.00	
3.27.03.2.02.0010.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	37,500,000.00	
3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	340,575,000.00	
3.27.04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	
3.27.04.2.01.0008.	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	
3.27.04.2.03.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	305,575,000.00	
3.27.04.2.03.0002.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	305,575,000.00	
3.27.04.2.04.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	10,000,000.00	
3.27.04.2.04.0002.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	10,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.04.2.04.0004.	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	160,000,000.00	
3.27.05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	160,000,000.00	
3.27.05.2.01.0001.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	160,000,000.00	
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	160,000,000.00	
3.27.07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	160,000,000.00	
3.27.07.2.01.0001.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	160,000,000.00	
3.27.07.2.01.0002.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	-	
	Dinas Lingkungan Hidup	25,324,123,071.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25,324,123,071.00	
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	25,324,123,071.00	
2.11.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,721,695,875.00	
2.11.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90,000,000.00	
2.11.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45,000,000.00	
2.11.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,000,000.00	
2.11.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,347,823,150.00	
2.11.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,338,823,150.00	
2.11.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9,000,000.00	
2.11.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,000,000.00	
2.11.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9,000,000.00	
2.11.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111,406,123.00	
2.11.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	111,406,123.00	
2.11.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	618,447,921.00	
2.11.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35,000,000.00	
2.11.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000.00	
2.11.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	81,054,921.00	
2.11.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181,900,000.00	
2.11.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220,493,000.00	
2.11.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71,373,685.00	
2.11.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	21,373,685.00	
2.11.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00	
2.11.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304,300,000.00	
2.11.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000.00	
2.11.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150,000,000.00	
2.11.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150,300,000.00	
2.11.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169,344,996.00	
2.11.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,000,000.00	
2.11.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00	
2.11.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59,344,996.00	
2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	200,000,000.00	
2.11.02.2.02.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	200,000,000.00	
2.11.02.2.02.0002.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	200,000,000.00	
2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	290,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	145,000,000.00	
2.11.03.2.01.0005.	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	45,000,000.00	
2.11.03.2.01.0007.	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	90,000,000.00	
2.11.03.2.01.0011.	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	10,000,000.00	
2.11.03.2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	25,000,000.00	
2.11.03.2.02.0001.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	25,000,000.00	
2.11.03.2.03.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	120,000,000.00	
2.11.03.2.03.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	50,000,000.00	
2.11.03.2.03.0009.	Pelaksanaan rehabilitasi	70,000,000.00	
2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3,690,587,000.00	
2.11.04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3,690,587,000.00	
2.11.04.2.01.0004.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3,590,587,000.00	
2.11.04.2.01.0006.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100,000,000.00	
2.11.05.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	39,000,000.00	
2.11.05.2.01.	Penyimpanan sementara Limbah B3	23,000,000.00	
2.11.05.2.01.0002.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	23,000,000.00	
2.11.05.2.02.	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16,000,000.00	
2.11.05.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	16,000,000.00	
2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	170,000,000.00	
2.11.06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	170,000,000.00	
2.11.06.2.01.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	110,000,000.00	
2.11.06.2.01.0005.	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	60,000,000.00	
2.11.07.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	25,000,000.00	
2.11.07.2.01.	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	25,000,000.00	
2.11.07.2.01.0001.	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	25,000,000.00	
2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50,000,000.00	
2.11.08.2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.11.08.2.01.0005.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	50,000,000.00	
2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50,000,000.00	
2.11.09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	
2.11.09.2.01.0001.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50,000,000.00	
2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	15,000,000.00	
2.11.10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	15,000,000.00	
2.11.10.2.01.0004.	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	15,000,000.00	
2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13,072,840,196.00	
2.11.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	13,072,840,196.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.11.2.01.0004.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	220,000,000.00	
2.11.11.2.01.0005.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	31,000,000.00	
2.11.11.2.01.0007.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	780,000,000.00	
2.11.11.2.01.0008.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	30,000,000.00	
2.11.11.2.01.0013.	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	30,000,000.00	
2.11.11.2.01.0020.	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	11,981,840,196.00	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7,848,931,395.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7,848,931,395.00	
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7,848,931,395.00	
2.12.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,182,821,780.00	
2.12.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,146,000.00	
2.12.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31,976,000.00	
2.12.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,170,000.00	
2.12.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,500,070,141.00	
2.12.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,490,070,141.00	
2.12.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000.00	
2.12.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	
2.12.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
2.12.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	
2.12.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	586,616,639.00	
2.12.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,018,191.00	
2.12.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	296,205,500.00	
2.12.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,368,333.00	
2.12.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194,450,000.00	
2.12.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,786,615.00	
2.12.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67,788,000.00	
2.12.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	325,000,000.00	
2.12.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	
2.12.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	
2.12.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	325,000,000.00	
2.12.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
2.12.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	604,911,000.00	
2.12.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,550,000.00	
2.12.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139,361,000.00	
2.12.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	462,000,000.00	
2.12.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,078,000.00	
2.12.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58,400,000.00	
2.12.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	
2.12.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,128,000.00	
2.12.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,550,000.00	
2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	102,650,000.00	
2.12.02.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	102,650,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.02.2.01.0001.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-	
2.12.02.2.01.0004.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	102,650,000.00	
2.12.02.2.01.0006.	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	
2.12.02.2.01.0007.	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	-	
2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	86,491,615.00	
2.12.03.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	86,491,615.00	
2.12.03.2.01.0001.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	
2.12.03.2.01.0002.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	86,491,615.00	
2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	444,421,000.00	
2.12.04.2.01.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	
2.12.04.2.01.0002.	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	
2.12.04.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	444,421,000.00	
2.12.04.2.03.0003.	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	416,708,000.00	
2.12.04.2.03.0007.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	27,713,000.00	
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	32,547,000.00	
2.12.05.2.01.	Penyusunan Profil Kependudukan	32,547,000.00	
2.12.05.2.01.0001.	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	32,547,000.00	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,595,340,294.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6,595,340,294.00	
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6,595,340,294.00	
2.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,085,340,294.00	
2.13.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,000,000.00	
2.13.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,000,000.00	
2.13.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000.00	
2.13.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,625,329,983.00	
2.13.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,609,873,983.00	
2.13.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15,456,000.00	
2.13.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,000,000.00	
2.13.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000.00	
2.13.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44,544,000.00	
2.13.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
2.13.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44,544,000.00	
2.13.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	361,693,032.00	
2.13.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000.00	
2.13.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000.00	
2.13.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,000,000.00	
2.13.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,000,000.00	
2.13.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	
2.13.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151,693,032.00	
2.13.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30,000,000.00	
2.13.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000.00	
2.13.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	853,773,279.00	
2.13.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	
2.13.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	825,773,279.00	
2.13.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,000,000.00	
2.13.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,000,000.00	
2.13.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000.00	
2.13.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	20,000,000.00	
2.13.02.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa	20,000,000.00	
2.13.02.2.01.0002.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	20,000,000.00	
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	30,000,000.00	
2.13.03.2.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	30,000,000.00	
2.13.03.2.01.0002.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	30,000,000.00	
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	450,000,000.00	
2.13.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	450,000,000.00	
2.13.04.2.01.0003.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	30,000,000.00	
2.13.04.2.01.0004.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,000,000.00	
2.13.04.2.01.0005.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	30,000,000.00	
2.13.04.2.01.0008.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	40,000,000.00	
2.13.04.2.01.0011.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	60,000,000.00	
2.13.04.2.01.0013.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	30,000,000.00	
2.13.04.2.01.0015.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	70,000,000.00	
2.13.04.2.01.0018.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	90,000,000.00	
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,010,000,000.00	
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,010,000,000.00	
2.13.05.2.01.0002.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50,000,000.00	
2.13.05.2.01.0005.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50,000,000.00	
2.13.05.2.01.0006.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50,000,000.00	
2.13.05.2.01.0007.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	200,000,000.00	
2.13.05.2.01.0008.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	260,000,000.00	
2.13.05.2.01.0009.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	400,000,000.00	
	Dinas Perhubungan	11,888,815,892.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11,888,815,892.00	
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	11,888,815,892.00	
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,701,018,892.00	
2.15.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96,000,000.00	
2.15.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48,000,000.00	
2.15.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48,000,000.00	
2.15.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,462,281,563.00	
2.15.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,442,281,563.00	
2.15.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20,000,000.00	
2.15.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
2.15.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	
2.15.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	425,957,702.00	
2.15.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,053,600.00	
2.15.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000.00	
2.15.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,725,265.00	
2.15.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164,429,760.00	
2.15.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34,999,077.00	
2.15.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149,750,000.00	
2.15.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,999,397.00	
2.15.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	
2.15.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	27,876,001.00	
2.15.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67,123,396.00	
2.15.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460,900,000.00	
2.15.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00	
2.15.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111,000,000.00	
2.15.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343,900,000.00	
2.15.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160,880,230.00	
2.15.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43,690,800.00	
2.15.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58,469,300.00	
2.15.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,480,500.00	
2.15.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000.00	
2.15.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19,239,630.00	
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3,764,461,000.00	
2.15.02.2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,446,220,000.00	
2.15.02.2.02.0002.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	770,000,000.00	
2.15.02.2.02.0004.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	676,220,000.00	
2.15.02.2.03.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	8,740,000.00	
2.15.02.2.03.0011.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	8,740,000.00	
2.15.02.2.04.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	42,817,500.00	
2.15.02.2.04.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	42,817,500.00	
2.15.02.2.05.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,751,015,000.00	
2.15.02.2.05.0001.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1,500,000,000.00	
2.15.02.2.05.0002.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	144,015,000.00	
2.15.02.2.05.0004.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20,375,000.00	
2.15.02.2.05.0007.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	69,625,000.00	
2.15.02.2.05.0008.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17,000,000.00	
2.15.02.2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	465,206,000.00	
2.15.02.2.06.0015.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	28,806,000.00	
2.15.02.2.06.0017.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	436,400,000.00	
2.15.02.2.08.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	20,336,000.00	
2.15.02.2.08.0003.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	-	
2.15.02.2.08.0007.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	20,336,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.2.09.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30,126,500.00	
2.15.02.2.09.0002.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	30,126,500.00	
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	423,336,000.00	
2.15.03.2.02.	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	26,571,000.00	
2.15.03.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	26,571,000.00	
2.15.03.2.12.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	396,765,000.00	
2.15.03.2.12.0002.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	
2.15.03.2.12.0003.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	396,765,000.00	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	14,981,125,028.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14,981,125,028.00	
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14,806,125,028.00	
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,550,938,537.00	
2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82,420,249.00	
2.16.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42,434,250.00	
2.16.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,985,999.00	
2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,780,920,024.00	
2.16.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,745,920,024.00	
2.16.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35,000,000.00	
2.16.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28,900,000.00	
2.16.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28,900,000.00	
2.16.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72,689,307.00	
2.16.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
2.16.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72,689,307.00	
2.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	531,076,312.00	
2.16.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000.00	
2.16.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80,000,000.00	
2.16.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,000,000.00	
2.16.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203,200,000.00	
2.16.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37,876,312.00	
2.16.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170,000,000.00	
2.16.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	201,291,845.00	
2.16.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	201,291,845.00	
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,636,344,800.00	
2.16.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00	
2.16.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,096,344,800.00	
2.16.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	534,000,000.00	
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217,296,000.00	
2.16.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93,846,000.00	
2.16.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123,450,000.00	
2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3,977,455,439.00	
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,977,455,439.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.02.2.01.0002.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	113,370,040.00	
2.16.02.2.01.0004.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	148,338,050.00	
2.16.02.2.01.0005.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	101,111,372.00	
2.16.02.2.01.0006.	Pelayanan Informasi Publik	58,465,000.00	
2.16.02.2.01.0010.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-	
2.16.02.2.01.0012.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	3,556,170,977.00	
2.16.02.2.01.0013.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2,277,731,052.00	
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
2.16.03.2.01.0002.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
2.16.03.2.02.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,177,731,052.00	
2.16.03.2.02.0001.	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	
2.16.03.2.02.0003.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	295,000,000.00	
2.16.03.2.02.0007.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	525,000,000.00	
2.16.03.2.02.0010.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1,257,731,052.00	
2.16.03.2.02.0011.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	-	
2.16.03.2.02.0012.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	100,000,000.00	
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	75,000,000.00	
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	75,000,000.00	
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000.00	
2.20.02.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	50,000,000.00	
2.20.02.2.01.0003.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	25,000,000.00	
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	100,000,000.00	
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	100,000,000.00	
2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
2.21.02.2.01.0001.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	
2.21.02.2.01.0002.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	
2.21.02.2.01.0003.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100,000,000.00	
2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	
2.21.02.2.02.0001.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	
	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	12,259,356,651.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10,214,356,651.00	
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10,214,356,651.00	
2.17.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,780,586,651.00	
2.17.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000.00	
2.17.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000.00	
2.17.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000.00	
2.17.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,653,093,882.00	
2.17.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,653,093,882.00	
2.17.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	
2.17.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43,555,571.00	
2.17.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43,555,571.00	
2.17.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	379,063,000.00	
2.17.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,000,000.00	
2.17.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83,121,000.00	
2.17.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,000,000.00	
2.17.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114,750,000.00	
2.17.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,192,000.00	
2.17.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125,000,000.00	
2.17.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	173,304,429.00	
2.17.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75,000,000.00	
2.17.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	50,000,000.00	
2.17.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48,304,429.00	
2.17.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337,704,198.00	
2.17.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,200,000.00	
2.17.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149,504,198.00	
2.17.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184,000,000.00	
2.17.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,865,571.00	
2.17.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,000,000.00	
2.17.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000.00	
2.17.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43,865,571.00	
2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	40,000,000.00	
2.17.03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	40,000,000.00	
2.17.03.2.01.0004.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000.00	
2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	316,690,000.00	
2.17.05.2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	316,690,000.00	
2.17.05.2.01.0001.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	316,690,000.00	
2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	385,000,000.00	
2.17.06.2.01.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	385,000,000.00	
2.17.06.2.01.0005.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	385,000,000.00	
2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1,452,080,000.00	
2.17.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1,452,080,000.00	
2.17.07.2.01.0002.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1,212,000,000.00	
2.17.07.2.01.0015.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	240,080,000.00	
2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1,240,000,000.00	
2.17.08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1,240,000,000.00	
2.17.08.2.01.0006.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	1,240,000,000.00	
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2,045,000,000.00	
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	900,000,000.00	
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	40,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.03.2.02.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	40,000,000.00	
3.30.03.2.02.0001.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	40,000,000.00	
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	660,000,000.00	
3.30.04.2.02.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	660,000,000.00	
3.30.04.2.02.0001.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	60,000,000.00	
3.30.04.2.02.0003.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	600,000,000.00	
3.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	40,000,000.00	
3.30.05.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000.00	
3.30.05.2.01.0004.	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	40,000,000.00	
3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	160,000,000.00	
3.30.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	160,000,000.00	
3.30.06.2.01.0001.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	105,000,000.00	
3.30.06.2.01.0002.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	55,000,000.00	
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1,145,000,000.00	
3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1,145,000,000.00	
3.31.02.2.01.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1,145,000,000.00	
3.31.02.2.01.0005.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1,145,000,000.00	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8,337,484,416.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8,337,484,416.00	
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8,337,484,416.00	
2.18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,097,752,416.00	
2.18.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65,400,000.00	
2.18.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45,000,000.00	
2.18.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,400,000.00	
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,049,215,796.00	
2.18.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,037,623,796.00	
2.18.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11,592,000.00	
2.18.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	
2.18.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	
2.18.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,000,000.00	
2.18.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45,000,000.00	
2.18.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563,136,620.00	
2.18.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,000,000.00	
2.18.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,000,000.00	
2.18.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000.00	
2.18.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128,000,000.00	
2.18.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,136,620.00	
2.18.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300,000,000.00	
2.18.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150,000,000.00	
2.18.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	
2.18.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90,000,000.00	
2.18.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	975,000,000.00	
2.18.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000.00	
2.18.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200,000,000.00	
2.18.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	771,000,000.00	
2.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250,000,000.00	
2.18.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77,000,000.00	
2.18.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,000,000.00	
2.18.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150,000,000.00	
2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	350,000,000.00	
2.18.02.2.01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
2.18.02.2.01.0001.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	
2.18.02.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	350,000,000.00	
2.18.02.2.02.0001.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	350,000,000.00	
2.18.02.2.02.0004.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	162,232,000.00	
2.18.03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	162,232,000.00	
2.18.03.2.01.0002.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	162,232,000.00	
2.18.03.2.01.0003.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	247,500,000.00	
2.18.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	247,500,000.00	
2.18.04.2.01.0006.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	142,500,000.00	
2.18.04.2.01.0007.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	35,000,000.00	
2.18.04.2.01.0008.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	70,000,000.00	
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	480,000,000.00	
2.18.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	480,000,000.00	
2.18.05.2.01.0004.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	72,246,000.00	
2.18.05.2.01.0005.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	319,443,000.00	
2.18.05.2.01.0006.	Pengawasan Penanaman Modal	88,311,000.00	
2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	
2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	
2.18.06.2.01.0002.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8,836,054,599.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8,836,054,599.00	
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8,836,054,599.00	
2.19.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,621,054,599.00	
2.19.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000.00	
2.19.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,000,000.00	
2.19.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000.00	
2.19.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,482,218,002.00	
2.19.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,470,626,002.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11,592,000.00	
2.19.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36,000,000.00	
2.19.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36,000,000.00	
2.19.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	572,176,597.00	
2.19.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00	
2.19.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,000,000.00	
2.19.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65,000,000.00	
2.19.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000.00	
2.19.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37,176,597.00	
2.19.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000.00	
2.19.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325,660,000.00	
2.19.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000.00	
2.19.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321,660,000.00	
2.19.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105,000,000.00	
2.19.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65,000,000.00	
2.19.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000.00	
2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,565,000,000.00	
2.19.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1,230,000,000.00	
2.19.02.2.01.0001.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	80,000,000.00	
2.19.02.2.01.0002.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda	150,000,000.00	
2.19.02.2.01.0006.	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	850,000,000.00	
2.19.02.2.01.0008.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	150,000,000.00	
2.19.02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	335,000,000.00	
2.19.02.2.02.0002.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	335,000,000.00	
2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2,350,000,000.00	
2.19.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,450,000,000.00	
2.19.03.2.02.0001.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	450,000,000.00	
2.19.03.2.02.0003.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1,000,000,000.00	
2.19.03.2.04.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	900,000,000.00	
2.19.03.2.04.0002.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	900,000,000.00	
2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300,000,000.00	
2.19.04.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300,000,000.00	
2.19.04.2.01.0002.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	300,000,000.00	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11,792,829,351.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8,823,993,291.00	
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	8,823,993,291.00	
2.22.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,481,993,291.00	
2.22.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,000,000.00	
2.22.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45,000,000.00	
2.22.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00	
2.22.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,443,390,008.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,401,390,008.00	
2.22.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42,000,000.00	
2.22.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	
2.22.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	
2.22.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65,000,000.00	
2.22.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
2.22.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65,000,000.00	
2.22.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	465,064,000.00	
2.22.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00	
2.22.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,000,000.00	
2.22.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35,000,000.00	
2.22.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183,064,000.00	
2.22.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,000,000.00	
2.22.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107,000,000.00	
2.22.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122,735,800.00	
2.22.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	15,000,000.00	
2.22.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107,735,800.00	
2.22.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
2.22.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
2.22.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935,803,483.00	
2.22.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,700,200.00	
2.22.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	312,000,000.00	
2.22.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	614,103,283.00	
2.22.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385,000,000.00	
2.22.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,000,000.00	
2.22.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,000,000.00	
2.22.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,000,000.00	
2.22.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250,000,000.00	
2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,477,000,000.00	
2.22.02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,167,000,000.00	
2.22.02.2.01.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	250,000,000.00	
2.22.02.2.01.0002.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	917,000,000.00	
2.22.02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	210,000,000.00	
2.22.02.2.02.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	50,000,000.00	
2.22.02.2.02.0002.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	160,000,000.00	
2.22.02.2.03.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	
2.22.02.2.03.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	100,000,000.00	
2.22.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	
2.22.03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	
2.22.03.2.01.0001.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	-	
2.22.04.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	
2.22.04.2.01.	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	
2.22.04.2.01.0003.	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	-	
2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	15,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.05.2.01.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	
2.22.05.2.01.0002.	Penetapan Cagar Budaya	-	
2.22.05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	15,000,000.00	
2.22.05.2.02.0001.	Pelindungan Cagar Budaya	15,000,000.00	
2.22.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	850,000,000.00	
2.22.06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	850,000,000.00	
2.22.06.2.01.0001.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	850,000,000.00	
2.22.06.2.01.0002.	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	-	
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2,968,836,060.00	
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2,968,836,060.00	
3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	287,071,212.00	
3.26.02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	25,000,000.00	
3.26.02.2.01.0007.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	25,000,000.00	
3.26.02.2.02.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	
3.26.02.2.02.0001.	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	
3.26.02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	262,071,212.00	
3.26.02.2.03.0003.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	
3.26.02.2.03.0004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	262,071,212.00	
3.26.02.2.03.0006.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	
3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2,581,764,848.00	
3.26.03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2,581,764,848.00	
3.26.03.2.01.0003.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-	
3.26.03.2.01.0004.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-	
3.26.03.2.01.0005.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	
3.26.03.2.01.0006.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2,340,000,000.00	
3.26.03.2.01.0007.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	241,764,848.00	
3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	50,000,000.00	
3.26.04.2.01.	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksprei, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	-	
3.26.04.2.01.0001.	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	-	
3.26.04.2.02.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	50,000,000.00	
3.26.04.2.02.0005.	Pengembangan Sistem Pemasaran	-	
3.26.04.2.02.0022.	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	50,000,000.00	
3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	50,000,000.00	
3.26.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50,000,000.00	
3.26.05.2.01.0011.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50,000,000.00	
3.26.05.2.02.	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	
3.26.05.2.02.0001.	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-	
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5,408,281,801.00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5,408,281,801.00	
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5,333,281,801.00	
2.23.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,959,531,801.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000.00	
2.23.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000.00	
2.23.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000.00	
2.23.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,860,293,187.00	
2.23.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,852,565,187.00	
2.23.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,728,000.00	
2.23.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,000,000.00	
2.23.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
2.23.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35,000,000.00	
2.23.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358,428,000.00	
2.23.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	
2.23.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,000,000.00	
2.23.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000.00	
2.23.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174,000,000.00	
2.23.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	
2.23.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,428,000.00	
2.23.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	
2.23.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
2.23.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359,700,000.00	
2.23.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	
2.23.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102,700,000.00	
2.23.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252,000,000.00	
2.23.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246,110,614.00	
2.23.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111,110,614.00	
2.23.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,000,000.00	
2.23.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000.00	
2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	373,750,000.00	
2.23.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	245,000,000.00	
2.23.02.2.01.0001.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	70,000,000.00	
2.23.02.2.01.0004.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	30,000,000.00	
2.23.02.2.01.0006.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	
2.23.02.2.01.0007.	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	35,000,000.00	
2.23.02.2.01.0008.	Pengembangan Bahan Pustaka	85,000,000.00	
2.23.02.2.01.0009.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	10,000,000.00	
2.23.02.2.01.0010.	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000.00	
2.23.02.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	128,750,000.00	
2.23.02.2.02.0001.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	30,000,000.00	
2.23.02.2.02.0003.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	-	
2.23.02.2.02.0004.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	98,750,000.00	
2.23.02.2.02.0005.	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	
2.23.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	
2.23.03.2.01.	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	
2.23.03.2.01.0001.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.03.2.01.0002.	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	-	
2.23.03.2.02.	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	
2.23.03.2.02.0001.	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	-	
2.23.03.2.02.0002.	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	-	
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	75,000,000.00	
2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	75,000,000.00	
2.24.02.2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000.00	
2.24.02.2.01.0001.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	-	
2.24.02.2.01.0002.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	40,000,000.00	
2.24.02.2.01.0003.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-	
2.24.02.2.02.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	35,000,000.00	
2.24.02.2.02.0002.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	35,000,000.00	
2.24.02.2.03.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	
2.24.02.2.03.0001.	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-	
2.24.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	
2.24.03.2.03.	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	
2.24.03.2.03.0001.	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	
	Dinas Perikanan	15,098,367,840.00	
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15,098,367,840.00	
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	15,098,367,840.00	
3.25.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,725,967,840.00	
3.25.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000.00	
3.25.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,000,000.00	
3.25.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000.00	
3.25.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,477,747,215.00	
3.25.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,467,747,215.00	
3.25.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000.00	
3.25.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,000,000.00	
3.25.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000.00	
3.25.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,737,000.00	
3.25.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
3.25.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12,737,000.00	
3.25.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285,778,875.00	
3.25.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	
3.25.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,069,875.00	
3.25.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,000,000.00	
3.25.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80,000,000.00	
3.25.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	
3.25.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80,709,000.00	
3.25.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21,000,000.00	
3.25.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	
3.25.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,000,000.00	
3.25.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633,704,750.00	
3.25.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000.00	
3.25.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160,000,000.00	
3.25.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	472,204,750.00	
3.25.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190,000,000.00	
3.25.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30,000,000.00	
3.25.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,000,000.00	
3.25.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	
3.25.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000.00	
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3,427,400,000.00	
3.25.03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	80,000,000.00	
3.25.03.2.01.0001.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	80,000,000.00	
3.25.03.2.01.0002.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	-	
3.25.03.2.01.0003.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	-	
3.25.03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,347,400,000.00	
3.25.03.2.02.0001.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3,317,400,000.00	
3.25.03.2.02.0002.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	30,000,000.00	
3.25.03.2.02.0003.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	-	
3.25.03.2.03.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	
3.25.03.2.03.0001.	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	
3.25.03.2.03.0002.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2,330,000,000.00	
3.25.04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	20,000,000.00	
3.25.04.2.02.0001.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	-	
3.25.04.2.02.0002.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	20,000,000.00	
3.25.04.2.02.0003.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	-	
3.25.04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2,310,000,000.00	
3.25.04.2.04.0001.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70,000,000.00	
3.25.04.2.04.0002.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	460,000,000.00	
3.25.04.2.04.0003.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,765,000,000.00	
3.25.04.2.04.0004.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000.00	
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	615,000,000.00	
3.25.06.2.01.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	60,000,000.00	
3.25.06.2.01.0001.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,000,000.00	
3.25.06.2.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	60,000,000.00	
3.25.06.2.02.0001.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	60,000,000.00	
3.25.06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	495,000,000.00	
3.25.06.2.03.0001.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45,000,000.00	
3.25.06.2.03.0002.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	450,000,000.00	
	Sekretariat Daerah	69,841,441,103.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	69,661,441,103.00	
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	69,661,441,103.00	
4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35,860,534,201.00	
4.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	195,000,000.00	
4.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95,000,000.00	
4.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000.00	
4.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17,368,113,997.00	
4.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,213,113,997.00	
4.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65,000,000.00	
4.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	90,000,000.00	
4.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	78,959,620.00	
4.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	78,959,620.00	
4.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170,000,000.00	
4.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
4.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	170,000,000.00	
4.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,629,383,422.00	
4.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80,000,000.00	
4.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,000,000.00	
4.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40,000,000.00	
4.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1,984,383,422.00	
4.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200,000,000.00	
4.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,125,000,000.00	
4.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300,000,000.00	
4.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300,000,000.00	
4.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,340,148,000.00	
4.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000.00	
4.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,150,000,000.00	
4.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275,600,000.00	
4.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,894,548,000.00	
4.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,968,000,000.00	
4.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,068,000,000.00	
4.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	450,000,000.00	
4.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,450,000,000.00	
4.01.01.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,187,647,185.00	
4.01.01.2.11.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	813,082,080.00	
4.01.01.2.11.0002.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	230,000,000.00	
4.01.01.2.11.0003.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	144,565,105.00	
4.01.01.2.12.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3,650,000,000.00	
4.01.01.2.12.0001.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1,300,000,000.00	
4.01.01.2.12.0002.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	800,000,000.00	
4.01.01.2.12.0003.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1,550,000,000.00	
4.01.01.2.13.	Penataan Organisasi	500,233,902.00	
4.01.01.2.13.0001.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	158,076,000.00	
4.01.01.2.13.0002.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	113,152,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.13.0003.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	59,195,000.00	
4.01.01.2.13.0004.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	63,152,000.00	
4.01.01.2.13.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	106,658,902.00	
4.01.01.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	473,048,075.00	
4.01.01.2.14.0001.	Fasilitasi Keprotokolan	159,349,359.00	
4.01.01.2.14.0002.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	159,349,358.00	
4.01.01.2.14.0003.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	154,349,358.00	
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	32,734,250,218.00	
4.01.02.2.01.	Administrasi Tata Pemerintahan	4,193,208,551.00	
4.01.02.2.01.0001.	Penataan Administrasi Pemerintahan	187,905,000.00	
4.01.02.2.01.0002.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3,725,303,551.00	
4.01.02.2.01.0003.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	280,000,000.00	
4.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	28,143,826,000.00	
4.01.02.2.02.0001.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15,778,975,420.00	
4.01.02.2.02.0002.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	9,664,850,580.00	
4.01.02.2.02.0003.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2,700,000,000.00	
4.01.02.2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	347,215,667.00	
4.01.02.2.03.0001.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	100,087,667.00	
4.01.02.2.03.0002.	Fasilitasi Bantuan Hukum	177,591,080.00	
4.01.02.2.03.0003.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	69,536,920.00	
4.01.02.2.04.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	50,000,000.00	
4.01.02.2.04.0001.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	50,000,000.00	
4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,066,656,684.00	
4.01.03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	300,000,000.00	
4.01.03.2.01.0001.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100,000,000.00	
4.01.03.2.01.0002.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	120,000,000.00	
4.01.03.2.01.0003.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	80,000,000.00	
4.01.03.2.02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	153,000,000.00	
4.01.03.2.02.0001.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	55,000,000.00	
4.01.03.2.02.0002.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	48,000,000.00	
4.01.03.2.02.0003.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	50,000,000.00	
4.01.03.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	613,656,684.00	
4.01.03.2.03.0001.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72,502,400.00	
4.01.03.2.03.0002.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	474,580,284.00	
4.01.03.2.03.0003.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	66,574,000.00	
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	180,000,000.00	
5.06.	PENGELOLAAN PERBATASAN	180,000,000.00	
5.06.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	180,000,000.00	
5.06.02.2.01.	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	80,000,000.00	
5.06.02.2.01.0001.	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	-	
5.06.02.2.01.0002.	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	80,000,000.00	
5.06.02.2.02.	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	50,000,000.00	
5.06.02.2.02.0001.	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	-	
5.06.02.2.02.0002.	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	-	
5.06.02.2.02.0003.	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	50,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.06.02.2.03.	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	50,000,000.00	
5.06.02.2.03.0001.	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	50,000,000.00	
	Sekretariat DPRD	31,983,384,000.00	
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	31,983,384,000.00	
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	31,983,384,000.00	
4.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23,938,457,421.00	
4.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130,000,000.00	
4.02.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,000,000.00	
4.02.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,000,000.00	
4.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,323,817,052.00	
4.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,316,089,052.00	
4.02.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,728,000.00	
4.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20,000,000.00	
4.02.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20,000,000.00	
4.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250,000,000.00	
4.02.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
4.02.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000.00	
4.02.01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000.00	
4.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,082,000,000.00	
4.02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190,000,000.00	
4.02.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72,000,000.00	
4.02.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500,000,000.00	
4.02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000.00	
4.02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170,000,000.00	
4.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	142,886,776.00	
4.02.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	50,000,000.00	
4.02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92,886,776.00	
4.02.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
4.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,966,560,000.00	
4.02.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000.00	
4.02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	430,000,000.00	
4.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,524,560,000.00	
4.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480,000,000.00	
4.02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,000,000.00	
4.02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130,000,000.00	
4.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000.00	
4.02.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000.00	
4.02.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
4.02.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000.00	
4.02.01.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	425,000,000.00	
4.02.01.2.14.0001.	Fasilitasi Keprotokolan	400,000,000.00	
4.02.01.2.14.0003.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	25,000,000.00	
4.02.01.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11,534,943,757.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.15.0001.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10,948,751,257.00	
4.02.01.2.15.0002.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	350,000,000.00	
4.02.01.2.15.0003.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	236,192,500.00	
4.02.01.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	2,583,249,836.00	
4.02.01.2.16.0003.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1,583,249,836.00	
4.02.01.2.16.0004.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1,000,000,000.00	
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	8,044,926,579.00	
4.02.02.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	670,000,000.00	
4.02.02.2.01.0001.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	170,000,000.00	
4.02.02.2.01.0002.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	450,000,000.00	
4.02.02.2.01.0004.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	50,000,000.00	
4.02.02.2.02.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	770,000,000.00	
4.02.02.2.02.0001.	Pembahasan KUA dan PPAS	170,000,000.00	
4.02.02.2.02.0002.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	170,000,000.00	
4.02.02.2.02.0003.	Pembahasan APBD	100,000,000.00	
4.02.02.2.02.0004.	Pembahasan APBD Perubahan	170,000,000.00	
4.02.02.2.02.0006.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	160,000,000.00	
4.02.02.2.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3,360,000,000.00	
4.02.02.2.03.0001.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	640,000,000.00	
4.02.02.2.03.0002.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	640,000,000.00	
4.02.02.2.03.0003.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	640,000,000.00	
4.02.02.2.03.0004.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	640,000,000.00	
4.02.02.2.03.0005.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	640,000,000.00	
4.02.02.2.03.0008.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	160,000,000.00	
4.02.02.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	1,050,000,000.00	
4.02.02.2.04.0001.	Orientasi DPRD	-	
4.02.02.2.04.0002.	Pendalaman Tugas DPRD	400,000,000.00	
4.02.02.2.04.0007.	Penyusunan Program Kerja DPRD	50,000,000.00	
4.02.02.2.04.0008.	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	600,000,000.00	
4.02.02.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2,024,926,579.00	
4.02.02.2.05.0001.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	150,000,000.00	
4.02.02.2.05.0002.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	74,926,579.00	
4.02.02.2.05.0003.	Pelaksanaan Reses	1,800,000,000.00	
4.02.02.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	170,000,000.00	
4.02.02.2.08.0003.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	170,000,000.00	
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	16,426,686,738.00	
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	16,426,686,738.00	
5.01.	PERENCANAAN	14,901,686,738.00	
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,206,686,738.00	
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110,000,000.00	
5.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,000,000.00	
5.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00	
5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,181,958,738.00	
5.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,131,958,738.00	
5.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7,728,000.00	
5.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7,728,000.00	
5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000.00	
5.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
5.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000.00	
5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,005,000,000.00	
5.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00	
5.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200,000,000.00	
5.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	125,000,000.00	
5.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250,000,000.00	
5.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000.00	
5.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300,000,000.00	
5.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75,000,000.00	
5.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75,000,000.00	
5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,267,000,000.00	
5.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	
5.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496,000,000.00	
5.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	761,000,000.00	
5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460,000,000.00	
5.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125,000,000.00	
5.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,000,000.00	
5.01.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175,000,000.00	
5.01.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000.00	
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3,010,000,000.00	
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2,230,000,000.00	
5.01.02.2.01.0001.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	400,000,000.00	
5.01.02.2.01.0002.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	75,000,000.00	
5.01.02.2.01.0003.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	206,365,000.00	
5.01.02.2.01.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	105,000,000.00	
5.01.02.2.01.0005.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	475,360,000.00	
5.01.02.2.01.0006.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	130,000,000.00	
5.01.02.2.01.0007.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	838,275,000.00	
5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	230,000,000.00	
5.01.02.2.02.0001.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	115,000,000.00	
5.01.02.2.02.0003.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	115,000,000.00	
5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	550,000,000.00	
5.01.02.2.03.0003.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	550,000,000.00	
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,685,000,000.00	
5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	700,000,000.00	
5.01.03.2.01.0001.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	190,000,000.00	
5.01.03.2.01.0002.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	71,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.01.0003.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	45,000,000.00	
5.01.03.2.01.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	15,000,000.00	
5.01.03.2.01.0005.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	200,000,000.00	
5.01.03.2.01.0006.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	78,000,000.00	
5.01.03.2.01.0007.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	90,000,000.00	
5.01.03.2.01.0008.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11,000,000.00	
5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	635,000,000.00	
5.01.03.2.02.0001.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	225,000,000.00	
5.01.03.2.02.0002.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	30,000,000.00	
5.01.03.2.02.0003.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	50,000,000.00	
5.01.03.2.02.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	30,000,000.00	
5.01.03.2.02.0005.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	180,000,000.00	
5.01.03.2.02.0006.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30,000,000.00	
5.01.03.2.02.0007.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	60,000,000.00	
5.01.03.2.02.0008.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	30,000,000.00	
5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	350,000,000.00	
5.01.03.2.03.0001.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	220,000,000.00	
5.01.03.2.03.0002.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50,000,000.00	
5.01.03.2.03.0003.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50,000,000.00	
5.01.03.2.03.0004.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	30,000,000.00	
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,525,000,000.00	
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,525,000,000.00	
5.05.02.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	595,000,000.00	
5.05.02.2.01.0002.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	200,000,000.00	
5.05.02.2.01.0004.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	150,000,000.00	
5.05.02.2.01.0005.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	100,000,000.00	
5.05.02.2.01.0012.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	145,000,000.00	
5.05.02.2.02.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	
5.05.02.2.02.0001.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	-	
5.05.02.2.02.0004.	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	-	
5.05.02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	270,000,000.00	
5.05.02.2.03.0005.	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	100,000,000.00	
5.05.02.2.03.0010.	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	170,000,000.00	
5.05.02.2.03.0012.	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	-	
5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	660,000,000.00	
5.05.02.2.04.0002.	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	200,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.02.2.04.0003.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	200,000,000.00	
5.05.02.2.04.0004.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	260,000,000.00	
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	156,901,082,441.00	
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	156,901,082,441.00	
5.02.	KEUANGAN	156,901,082,441.00	
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24,398,482,105.00	
5.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75,000,000.00	
5.02.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75,000,000.00	
5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,229,470,274.00	
5.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,154,470,274.00	
5.02.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75,000,000.00	
5.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200,000,000.00	
5.02.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
5.02.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200,000,000.00	
5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,953,905,989.00	
5.02.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,000,000.00	
5.02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	843,905,989.00	
5.02.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60,000,000.00	
5.02.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350,000,000.00	
5.02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300,000,000.00	
5.02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350,000,000.00	
5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,410,000,000.00	
5.02.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,240,000,000.00	
5.02.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	70,000,000.00	
5.02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000.00	
5.02.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,000,000,000.00	
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,779,105,842.00	
5.02.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000.00	
5.02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,150,000,000.00	
5.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,614,105,842.00	
5.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751,000,000.00	
5.02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	371,000,000.00	
5.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180,000,000.00	
5.02.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000.00	
5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	130,443,600,336.00	
5.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	595,167,000.00	
5.02.02.2.01.0001.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	58,662,000.00	
5.02.02.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50,000,000.00	
5.02.02.2.01.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	225,060,000.00	
5.02.02.2.01.0008.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	261,445,000.00	
5.02.02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	460,000,000.00	
5.02.02.2.02.0001.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60,000,000.00	
5.02.02.2.02.0003.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.02.0005.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	120,000,000.00	
5.02.02.2.02.0009.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100,000,000.00	
5.02.02.2.02.0011.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120,000,000.00	
5.02.02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	614,000,000.00	
5.02.02.2.03.0001.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	42,000,000.00	
5.02.02.2.03.0002.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	102,000,000.00	
5.02.02.2.03.0003.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	141,000,000.00	
5.02.02.2.03.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	127,000,000.00	
5.02.02.2.03.0009.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	57,000,000.00	
5.02.02.2.03.0011.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	145,000,000.00	
5.02.02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	128,285,433,336.00	
5.02.02.2.04.0002.	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	57,000,000.00	
5.02.02.2.04.0008.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	118,516,241,400.00	
5.02.02.2.04.0009.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9,712,191,936.00	
5.02.02.2.05.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	489,000,000.00	
5.02.02.2.05.0002.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	369,000,000.00	
5.02.02.2.05.0003.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120,000,000.00	
5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2,059,000,000.00	
5.02.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,059,000,000.00	
5.02.03.2.01.0001.	Penyusunan Standar Harga	450,000,000.00	
5.02.03.2.01.0003.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100,000,000.00	
5.02.03.2.01.0005.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	150,000,000.00	
5.02.03.2.01.0006.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	115,000,000.00	
5.02.03.2.01.0007.	Pengamanan Barang Milik Daerah	180,000,000.00	
5.02.03.2.01.0009.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	190,000,000.00	
5.02.03.2.01.0010.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	284,000,000.00	
5.02.03.2.01.0012.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	360,000,000.00	
5.02.03.2.01.0013.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	230,000,000.00	
	Badan Pendapatan Daerah	21,401,579,254.00	
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	21,401,579,254.00	
5.02.	KEUANGAN	21,401,579,254.00	
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,146,149,254.00	
5.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,000,000.00	
5.02.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,000,000.00	
5.02.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000.00	
5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,778,649,254.00	
5.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,538,649,254.00	
5.02.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	240,000,000.00	
5.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5,000,000.00	
5.02.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	205,000,000.00	
5.02.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	125,000,000.00	
5.02.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80,000,000.00	
5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	800,000,000.00	
5.02.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00	
5.02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	190,000,000.00	
5.02.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000.00	
5.02.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160,000,000.00	
5.02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000.00	
5.02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270,000,000.00	
5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	525,000,000.00	
5.02.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	
5.02.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	200,000,000.00	
5.02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	325,000,000.00	
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,472,500,000.00	
5.02.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	
5.02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	375,000,000.00	
5.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,092,500,000.00	
5.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280,000,000.00	
5.02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,000,000.00	
5.02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,000,000.00	
5.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140,000,000.00	
5.02.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000.00	
5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3,255,430,000.00	
5.02.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3,255,430,000.00	
5.02.04.2.01.0001.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	50,000,000.00	
5.02.04.2.01.0002.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100,000,000.00	
5.02.04.2.01.0003.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	960,430,000.00	
5.02.04.2.01.0005.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	500,000,000.00	
5.02.04.2.01.0006.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100,000,000.00	
5.02.04.2.01.0007.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	150,000,000.00	
5.02.04.2.01.0008.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	-	
5.02.04.2.01.0009.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	
5.02.04.2.01.0010.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	75,000,000.00	
5.02.04.2.01.0011.	Penagihan Pajak Daerah	1,100,000,000.00	
5.02.04.2.01.0012.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50,000,000.00	
5.02.04.2.01.0013.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	70,000,000.00	
5.02.04.2.01.0014.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	50,000,000.00	
5.02.04.2.01.0015.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	50,000,000.00	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,307,028,138.00	
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7,307,028,138.00	
5.03.	KEPEGAWAIAN	7,107,028,138.00	
5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,796,028,138.00	
5.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000.00	
5.03.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000.00	
5.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,465,709,423.00	
5.03.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,455,709,423.00	
5.03.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000.00	
5.03.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	
5.03.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	
5.03.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000.00	
5.03.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000.00	
5.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	386,047,027.00	
5.03.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	
5.03.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86,047,027.00	
5.03.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,000,000.00	
5.03.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120,000,000.00	
5.03.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	
5.03.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120,000,000.00	
5.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	453,371,688.00	
5.03.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	165,626,396.00	
5.03.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	287,745,292.00	
5.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217,500,000.00	
5.03.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,500,000.00	
5.03.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,000,000.00	
5.03.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198,000,000.00	
5.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138,400,000.00	
5.03.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80,000,000.00	
5.03.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000.00	
5.03.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28,400,000.00	
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,311,000,000.00	
5.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	397,699,700.00	
5.03.02.2.01.0002.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	151,000,000.00	
5.03.02.2.01.0003.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	90,000,000.00	
5.03.02.2.01.0006.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	66,699,700.00	
5.03.02.2.01.0008.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	35,000,000.00	
5.03.02.2.01.0010.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	25,000,000.00	
5.03.02.2.01.0011.	Pengelolaan Data Kepegawaian	30,000,000.00	
5.03.02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	265,300,300.00	
5.03.02.2.02.0001.	Pengelolaan Mutasi ASN	90,700,000.00	
5.03.02.2.02.0002.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	83,700,000.00	
5.03.02.2.02.0003.	Pengelolaan Promosi ASN	90,900,300.00	
5.03.02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	458,000,000.00	
5.03.02.2.03.0002.	Pengelolaan Assessment Center	364,100,000.00	
5.03.02.2.03.0004.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	50,000,000.00	
5.03.02.2.03.0014.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	43,900,000.00	
5.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	190,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.04.0003.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	50,000,000.00	
5.03.02.2.04.0004.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	50,000,000.00	
5.03.02.2.04.0007.	Pembinaan Disiplin ASN	30,000,000.00	
5.03.02.2.04.0008.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40,000,000.00	
5.03.02.2.04.0009.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	20,000,000.00	
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	200,000,000.00	
5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	200,000,000.00	
5.04.02.2.01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	200,000,000.00	
5.04.02.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	200,000,000.00	
	Inspektorat Daerah	10,902,683,511.00	
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10,902,683,511.00	
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	10,902,683,511.00	
6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,289,683,511.00	
6.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,069,603.00	
6.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,069,603.00	
6.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,000,000.00	
6.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,123,613,908.00	
6.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,115,885,908.00	
6.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,728,000.00	
6.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	235,000,000.00	
6.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	235,000,000.00	
6.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	451,000,000.00	
6.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000.00	
6.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,000,000.00	
6.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,000,000.00	
6.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140,000,000.00	
6.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,000,000.00	
6.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000.00	
6.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113,000,000.00	
6.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113,000,000.00	
6.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198,000,000.00	
6.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00	
6.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,000,000.00	
6.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	162,000,000.00	
6.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,000,000.00	
6.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45,000,000.00	
6.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,000,000.00	
6.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40,000,000.00	
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,005,000,000.00	
6.01.02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	430,000,000.00	
6.01.02.2.01.0001.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	80,000,000.00	
6.01.02.2.01.0002.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	45,000,000.00	
6.01.02.2.01.0003.	Reviu Laporan Kinerja	30,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.02.2.01.0004.	Reviu Laporan Keuangan	40,000,000.00	
6.01.02.2.01.0005.	Pengawasan Desa	60,000,000.00	
6.01.02.2.01.0006.	Kerja Sama Pengawasan Internal	75,000,000.00	
6.01.02.2.01.0007.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100,000,000.00	
6.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	575,000,000.00	
6.01.02.2.02.0001.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	75,000,000.00	
6.01.02.2.02.0002.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	500,000,000.00	
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	608,000,000.00	
6.01.03.2.02.	Pendampingan dan Asistensi	608,000,000.00	
6.01.03.2.02.0001.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	358,000,000.00	
6.01.03.2.02.0003.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	75,000,000.00	
6.01.03.2.02.0004.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	175,000,000.00	
	Kecamatan Bintan Utara	7,974,644,963.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	7,950,912,563.00	
7.01.	KECAMATAN	7,950,912,563.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,406,235,563.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,000,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,000,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,447,246,735.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,447,246,735.00	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2,000,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,000,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,000,000.00	
7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35,000,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	625,175,628.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33,877,628.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134,085,000.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34,200,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	308,700,000.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,475,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68,838,000.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	191,000,000.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	28,000,000.00	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163,000,000.00	
7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	936,910,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,400,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230,510,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	702,000,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136,903,200.00	
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56,000,000.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60,903,200.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	66,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	419,677,000.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	123,537,000.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	123,537,000.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	296,140,000.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	241,140,000.00	
7.01.03.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	55,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37,000,000.00	
7.01.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5,000,000.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5,000,000.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5,000,000.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5,000,000.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5,000,000.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5,000,000.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,000,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5,000,000.00	
X.	NON URUSAN	23,732,400.00	
X.XX.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	23,732,400.00	
X.XX.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23,732,400.00	
X.XX.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23,732,400.00	
X.XX.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,732,400.00	
	KELURAHAN TANJUNG UBAN UTARA	471,300,000.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	471,300,000.00	
7.01.	KECAMATAN	471,300,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	471,300,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	471,300,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	390,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	81,300,000.00	
	KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR	256,259,500.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	256,259,500.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.	KECAMATAN	256,259,500.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	256,259,500.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	256,259,500.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	210,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46,259,500.00	
	KELURAHAN TANJUNG UBAN KOTA	587,670,500.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	587,670,500.00	
7.01.	KECAMATAN	587,670,500.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	587,670,500.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	587,670,500.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	378,142,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	209,528,500.00	
	KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN	375,595,100.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	375,595,100.00	
7.01.	KECAMATAN	375,595,100.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	375,595,100.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	375,595,100.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	168,100,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	207,495,100.00	
	Kecamatan Bintan Pesisir	3,792,589,215.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	3,792,589,215.00	
7.01.	KECAMATAN	3,792,589,215.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,427,789,215.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,350,505,215.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,342,777,215.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,728,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25,000,000.00	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25,000,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	425,300,000.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70,000,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,000,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225,000,000.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,000,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84,300,000.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145,000,000.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	45,000,000.00	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000.00	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367,000,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80,000,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	284,000,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69,984,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26,430,000.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25,193,410.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,369,000.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8,991,590.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	98,350,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	68,350,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	47,100,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21,250,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	30,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	188,100,000.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	145,000,000.00	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	145,000,000.00	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	43,100,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43,100,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	43,000,000.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	43,000,000.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25,350,000.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25,350,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25,350,000.00	
	Kecamatan Tambelan	4,832,674,186.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	4,832,674,186.00	
7.01.	KECAMATAN	4,832,674,186.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,412,674,186.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,500,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,500,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,303,524,916.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,293,524,916.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000.00	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,000,000.00	
7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9,000,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	392,806,770.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,000,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,806,770.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190,000,000.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14,000,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108,000,000.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123,642,500.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	38,642,500.00	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,000,000.00	
7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000.00	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476,200,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,200,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	440,000,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,500,000.00	
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12,000,000.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24,000,000.00	
7.01.01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	5,000,000.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,500,000.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18,000,000.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	49,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	324,000,000.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33,000,000.00	
7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5,000,000.00	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28,000,000.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	275,000,000.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	225,000,000.00	
7.01.03.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	16,000,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	16,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16,000,000.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16,000,000.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7,000,000.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7,000,000.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7,000,000.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7,000,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7,000,000.00	
	KELURAHAN TELUK SEKUNI	333,280,000.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	333,280,000.00	
7.01.	KECAMATAN	333,280,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	333,280,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	333,280,000.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13,280,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	208,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	112,000,000.00	
	Kecamatan Mantang	3,329,369,846.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	3,329,369,846.00	
7.01.	KECAMATAN	3,329,369,846.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,994,369,846.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,031,003,177.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,021,003,177.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000.00	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,000,000.00	
7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24,000,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350,166,669.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,000,000.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205,166,669.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67,000,000.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	10,000,000.00	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57,000,000.00	
7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377,200,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,200,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65,000,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	308,000,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115,000,000.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90,000,000.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	75,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	65,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	45,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	210,000,000.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20,000,000.00	
7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5,000,000.00	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15,000,000.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	170,000,000.00	
7.01.03.2.03.0001.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	170,000,000.00	
7.01.03.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	-	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	20,000,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20,000,000.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20,000,000.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5,000,000.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5,000,000.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5,000,000.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20,000,000.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20,000,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20,000,000.00	
	Kecamatan Toapaya	4,932,182,579.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	4,932,182,579.00	
7.01.	KECAMATAN	4,932,182,579.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,199,947,379.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,006,130.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,006,130.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,016,112,449.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,005,684,449.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,428,000.00	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3,864,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,864,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000.00	
7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,000,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	318,344,800.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,000,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,000,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128,000,000.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21,500,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80,844,800.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84,000,000.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	10,000,000.00	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74,000,000.00	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606,620,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93,620,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510,000,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131,000,000.00	
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15,000,000.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41,000,000.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,000,000.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52,000,000.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	130,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	120,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	556,235,200.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50,000,000.00	
7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50,000,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	17,024,800.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17,024,800.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	489,210,400.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	214,210,400.00	
7.01.03.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	275,000,000.00	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10,000,000.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10,000,000.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10,000,000.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10,000,000.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6,000,000.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6,000,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6,000,000.00	
	KELURAHAN TOAPAYA ASRI	431,927,500.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	431,927,500.00	
7.01.	KECAMATAN	431,927,500.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	431,927,500.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	431,927,500.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	340,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	91,927,500.00	
	Kecamatan Teluk Sebong	4,524,539,585.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	4,524,539,585.00	
7.01.	KECAMATAN	4,524,539,585.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,138,439,585.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,109,570,807.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,089,570,807.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20,000,000.00	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,000,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,000,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,500,000.00	
7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13,500,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	353,528,778.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,500,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57,770,000.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17,660,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182,500,000.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,000,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70,098,778.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65,000,000.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65,000,000.00	
7.01.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434,440,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109,440,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322,000,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112,400,000.00	
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71,400,000.00	
7.01.01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	-	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,000,000.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	55,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	228,900,000.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38,000,000.00	
7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3,000,000.00	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35,000,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	19,000,000.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19,000,000.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	144,900,000.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	144,900,000.00	
7.01.03.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	-	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	27,000,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	27,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	57,200,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32,200,000.00	
7.01.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27,200,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25,000,000.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25,000,000.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,000,000.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10,000,000.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10,000,000.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20,000,000.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20,000,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15,000,000.00	
7.01.06.2.01.0006.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5,000,000.00	
	KELURAHAN KOTA BARU	330,642,500.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	330,642,500.00	
7.01.	KECAMATAN	330,642,500.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	330,642,500.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	330,642,500.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	250,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	80,642,500.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
	Kecamatan Teluk Bintan	4,475,358,453.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	4,475,358,453.00	
7.01.	KECAMATAN	4,475,358,453.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,108,187,453.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,000,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,000,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,147,559,839.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,137,559,839.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000.00	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	
7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	282,027,614.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,527,614.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143,000,000.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,500,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,000,000.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74,000,000.00	
7.01.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74,000,000.00	
7.01.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480,400,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80,200,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399,000,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89,200,000.00	
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75,000,000.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,200,000.00	
7.01.01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	-	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	95,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	45,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	25,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02.0001.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	25,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	207,171,000.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20,000,000.00	
7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	147,171,000.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	147,171,000.00	
7.01.03.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	-	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	40,000,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20,000,000.00	
7.01.04.2.01.0001.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25,000,000.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25,000,000.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20,000,000.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20,000,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20,000,000.00	
7.01.06.2.01.0006.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	
7.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	
	KELURAHAN TEMBELING TANJUNG	467,500,000.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	467,500,000.00	
7.01.	KECAMATAN	467,500,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	467,500,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	467,500,000.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27,500,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	400,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40,000,000.00	
	Kecamatan Gunung Kijang	4,886,277,401.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	4,886,277,401.00	
7.01.	KECAMATAN	4,886,277,401.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,367,205,556.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53,084,908.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,984,908.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,100,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,116,074,246.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,108,874,246.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,200,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,500,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,500,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31,500,000.00	
7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31,500,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391,133,029.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,497,957.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70,298,190.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,605,012.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	161,489,200.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,175,816.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112,066,854.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58,019,798.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58,019,798.00	
7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615,700,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97,200,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	515,500,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,193,575.00	
7.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66,028,369.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,848,945.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22,316,261.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100,201,712.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	73,958,393.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	59,767,193.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14,191,200.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	26,243,319.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26,243,319.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	371,217,993.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25,691,953.00	
7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1,500,000.00	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24,191,953.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	66,253,070.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8,946,500.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	57,306,570.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	253,393,400.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	253,393,400.00	
7.01.03.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	-	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	25,879,570.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	25,879,570.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,660,800.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10,660,800.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10,660,800.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21,245,400.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21,245,400.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21,245,400.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15,745,940.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15,745,940.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15,745,940.00	
7.01.06.2.01.0006.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	
	KELURAHAN KAWAL	420,000,000.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	420,000,000.00	
7.01.	KECAMATAN	420,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	420,000,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	420,000,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	250,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	170,000,000.00	
	Kecamatan Bintan Timur	9,383,203,514.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	9,383,203,514.00	
7.01.	KECAMATAN	9,383,203,514.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,931,203,514.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,845,091.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,154,909.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,708,518,514.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,696,926,514.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11,592,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13,000,000.00	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13,000,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	571,000,000.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60,000,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128,000,000.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65,000,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120,000,000.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	78,000,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120,000,000.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	723,285,000.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	214,857,500.00	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	458,427,500.00	
7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000.00	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,569,700,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242,400,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,317,300,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295,700,000.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106,700,000.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,000,000.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129,000,000.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	110,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	30,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	255,000,000.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	175,000,000.00	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	175,000,000.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	50,000,000.00	
7.01.03.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	30,000,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25,000,000.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25,000,000.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	37,000,000.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	37,000,000.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	37,000,000.00	
	KELURAHAN SUNGAI ENAM	410,285,000.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	410,285,000.00	
7.01.	KECAMATAN	410,285,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	410,285,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	410,285,000.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14,000,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	320,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	76,285,000.00	
	KELURAHAN SUNGAI LEKOP	607,000,000.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	607,000,000.00	
7.01.	KECAMATAN	607,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	607,000,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	607,000,000.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15,072,500.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	560,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31,927,500.00	
	KELURAHAN KIJANG KOTA	1,238,212,500.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	1,238,212,500.00	
7.01.	KECAMATAN	1,238,212,500.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,238,212,500.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,238,212,500.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25,000,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,125,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	88,212,500.00	
	KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS	449,026,500.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	449,026,500.00	
7.01.	KECAMATAN	449,026,500.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	449,026,500.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	449,026,500.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14,529,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	290,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	144,497,500.00	
	Kecamatan Seri Kuala Lobam	5,687,207,749.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	5,687,207,749.00	
7.01.	KECAMATAN	5,687,207,749.00	
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,209,007,749.00	
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000.00	
7.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000.00	
7.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000.00	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,908,007,749.00	
7.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,893,007,749.00	
7.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15,000,000.00	
7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10,000,000.00	
7.01.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10,000,000.00	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40,000,000.00	
7.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
7.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40,000,000.00	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	370,000,000.00	
7.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000.00	
7.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,000,000.00	
7.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,000,000.00	
7.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	140,000,000.00	
7.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,000,000.00	
7.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,000,000.00	
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71,000,000.00	
7.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	
7.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71,000,000.00	
7.01.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	639,000,000.00	
7.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,000,000.00	
7.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88,000,000.00	
7.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	540,000,000.00	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121,000,000.00	
7.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42,000,000.00	
7.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000.00	
7.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59,000,000.00	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85,000,000.00	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	65,000,000.00	
7.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	45,000,000.00	
7.01.02.2.01.0002.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.02.2.02.0003.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20,000,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	352,200,000.00	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4,500,000.00	
7.01.03.2.01.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4,500,000.00	
7.01.03.2.01.0003.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30,000,000.00	
7.01.03.2.02.0001.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30,000,000.00	
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	287,700,000.00	
7.01.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	287,700,000.00	
7.01.03.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	-	
7.01.03.2.06.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	30,000,000.00	
7.01.03.2.06.0002.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30,000,000.00	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31,000,000.00	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6,000,000.00	
7.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6,000,000.00	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25,000,000.00	
7.01.04.2.02.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25,000,000.00	
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5,000,000.00	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5,000,000.00	
7.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5,000,000.00	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5,000,000.00	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,000,000.00	
7.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5,000,000.00	
	KELURAHAN TANJUNG PERMAI	410,827,000.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	410,827,000.00	
7.01.	KECAMATAN	410,827,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	410,827,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	410,827,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	180,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	230,827,000.00	
	KELURAHAN TELUK LOBAM	385,285,000.00	
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	385,285,000.00	
7.01.	KECAMATAN	385,285,000.00	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	385,285,000.00	
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	385,285,000.00	
7.01.03.2.02.0002.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	180,000,000.00	
7.01.03.2.02.0003.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	205,285,000.00	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23,142,759,392.00	
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	23,142,759,392.00	
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23,142,759,392.00	
8.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,941,606,279.00	
8.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000.00	
8.01.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,000,000.00	
8.01.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000.00	
8.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,105,230,474.00	
8.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,097,230,474.00	
8.01.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8,000,000.00	
8.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,700,000.00	
8.01.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	
8.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,700,000.00	
8.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264,810,000.00	
8.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	
8.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00	
8.01.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	
8.01.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120,000,000.00	
8.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	
8.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89,810,000.00	
8.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55,000,000.00	
8.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	25,000,000.00	
8.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000.00	
8.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368,750,000.00	
8.01.01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,050,000.00	
8.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,400,000.00	
8.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292,300,000.00	
8.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57,115,805.00	
8.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37,000,000.00	
8.01.01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	5,115,805.00	
8.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,000,000.00	
8.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000.00	
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,290,000,000.00	
8.01.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,290,000,000.00	

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.02.2.01.0003.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	
8.01.02.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	190,000,000.00	
8.01.02.2.01.0008.	Pembentukan Paskibraka	1,100,000,000.00	
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10,041,153,113.00	
8.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	10,041,153,113.00	
8.01.03.2.01.0001.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	9,628,981,613.00	
8.01.03.2.01.0003.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	112,171,500.00	
8.01.03.2.01.0005.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300,000,000.00	
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	40,000,000.00	
8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	40,000,000.00	
8.01.04.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40,000,000.00	
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	80,000,000.00	
8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	80,000,000.00	
8.01.05.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80,000,000.00	
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	6,750,000,000.00	
8.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6,750,000,000.00	
8.01.06.2.01.0002.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6,200,000,000.00	
8.01.06.2.01.0003.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	
8.01.06.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	
8.01.06.2.01.0005.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150,000,000.00	
8.01.06.2.01.0006.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	400,000,000.00	
		1,174,837,834,343.00	

4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

1) Belanja Hibah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah sebagaimana dimaksud diatas dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2) Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja bantuan digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun arlggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

3) Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal belanja tidak terduga

sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, menggunakan: a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak tersebut ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

4) Belanja Transfer

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah

kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.

a. Belanja bagi hasil

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa harus diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Belanja bantuan keuangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa

Belanja bantuan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. Bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
- b. Bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
- c. Bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya;
- d. Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa.

Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan. Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan

keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa,

sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Tabel IV.3.
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI,
BARANG DAN JASA, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, MODAL,
BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	539.523.253.409
2	Belanja Barang dan Jasa	360.410.793.623
3	Belanja Subsidi	1.471.000.000
4	Belanja Hibah	45.617.724.023
5	Belanja Bantuan Sosial	8.110.000.000
6	BELANJA MODAL	

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
	Belanja Modal Tanah	1.079.750.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.631.240.451
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.437.031.554
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.797.243.832
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.531.364.115
7	Belanja Tidak Terduga	9.712.191.936
8	Belanja Bagi Hasil	28.169.840.100
9	Belanja Bantuan Keuangan	90.346.401.300
	TOTAL	1.174.837.834.343

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

APBD pada Tahun 2024 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp.25.290.051.229,-. Upaya untuk menutup defisit anggaran tersebut, diutamakan berasal dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Dalam hal penerimaan pembiayaan untuk tahun 2024 Kebijakan pemerintah daerah adalah memanfaatkan penerimaan SiLPA tahun anggaran 2023, SiLPA dimaksud diprediksi dari hasil efisiensi pelaksanaan belanja dan kelebihan target pendapatan, yang selanjutnya diharapkan dapat menutup defisit tahun anggaran berjalan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, diproyeksikan sebesar Rp.25.290.051.229,-. Di samping penerimaan pembiayaan, untuk tahun 2024 dari sisi pengeluaran Pembiayaan Daerah, tidak direncanakan/tidak ada. Target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.1.
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.290.051.229
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	25.290.051.229
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.290.051.229
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	0
	Pembiayaan Neto	25.290.051.229

BAB VI

PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 disusun yang selanjutnya untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan dan akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan PPAS, seperti adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Bintan, adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS ini.

Bandar Seri Bentan, 14 September 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K